

SKRIPSI

**ANALISIS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA
PENGELOLAAN KEUANGAN DI PERUSAHAAN AIR MINUM
(PAM) TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE**



OLEH:

**REZKI BAHARANI
NIM: 2020203861211057**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA
PENGELOLAAN KEUANGAN DI PERUSAHAAN AIR MINUM
(PAM) TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE**



OLEH

**REZKI BAHARANI
2020203861211057**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepere

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Good Corporate Governance* pada
Pengelolaan Keuangan di Perusahaan Air Minum
(PAM) Tirta Karajae Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Rezki Baharani

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861211057

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.6250/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Darwis, S.E., M.Si.
NIDN : 2020058102



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 2001122 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Good Corporate Governance pada
Pengelolaan Keuangan di Perusahaan Air Minum
(PAM) Tirta Karajae Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Rezki Baharani

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861211057

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.6250/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2023

Tanggal Kelulusan : 16 Juli 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Darwis, S.E., M.Si.	(Ketua)	(.....)
Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M.	(Anggota)	(.....)
Darmianti Razak, M.Mktg.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP.197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt . Berkat hidayah, Rahmat Taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Oleh karena itu, tiada kata yang terindah selain ucapan syukur tak terhingga karena penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul "Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan Di Perusahaan (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare". Dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda tercinta kita, Nabi Muhammad Saw, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat nanti.

Dengan Mengucap rasa syukur kepada Allah Swt, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dan penuh tanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang atas antusias beserta pemikirannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Nurfadillah, S.E., M.M. sebagai ketua program studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan.

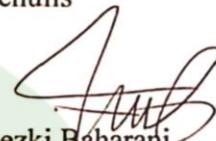
4. Bapak Darwis S.E., M.Si. selaku Dosen penasehat akademik yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan konsultasi akademik.
5. Bapak Darwis S.E., M.Si. selaku Pembimbing Utama telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan yang tak ternilai selama proses penulisan skripsi ini.
6. Perusahaan Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare yang telah mengizinkan dan memberikan data informasi terkait penelitian.
7. Teruntuk Cinta Pertama dan panutanku kepada Bapak Bahar, Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini. Terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan saya, dan terima kasih untuk kasih sayang, doa, dan dukungannya selama ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi.
8. Teruntuk Wanitaku Ibunda Heriyani wanita hebat yang sudah membesarkan dan mendidik anak-anaknya yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan saya, terima kasih untuk semua doa dan dukungannya saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. Mama harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapain hidup saya.
9. Kepada Adik-adikku Riswan, Nabila, Nikita, Ricky, Cahaya, Nafisa, Terima kasih telah memberikan doa, dukungan, motivasi dan perhatiannya yang sangat luar biasa kepada penulis, maaf belum bisa menjadi yang baik untuk kalian

10. Teruntuk Sahabat-sahabatku Resky amanda, Jusmiati, Luthfia wahyu kinanti, Surdiana, Putri agriyaningsih, Sugiarti, Suharsih, Mutiara nurarsy, Nurul huda yang telah membantu dan menemani penulis. Terima kasih sudah selalu kebersamai, memberikan kebahagiaan disetiap waktu dan selalu ada dalam keadaan apapun.
11. Kepada Muhammad hernan arya yang telah bersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah dan senantiasa sabar menghadapi sikap penulis selama proses mengerjakan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini. Tetaplah kebersamai dan tidak tunduk pada apa-apa serta memiliki jalan pemikiran yang jarang dimiliki oleh manusia lain.
12. Teruntuk teman-teman seperjuangan jurusan Manajemen Keuangan Syariah Angkatan 2020 yang tak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungan dan doa-doa baiknya
13. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa moril maupun materi hingga tulisan ini dapat di selesaikan. Semoga Allah SWT. Membalas segala kebaikan dan menjadikannya sebagai amal jariyah serta senantiasa memberikan rahmat dan pahalanya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Parepare, 24 Juni 2024
Penulis



Rezki Baharani
NIM:2020203861211057



ABSTRAK

Rezki Baharani: *Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan Di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare (dibimbing oleh Darwis)*

Good Corporate Governance dapat meningkatkan nilai dan mutu suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat menjadi perusahaan yang sehat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Transparansi pengelolaan keuangan, Akuntabilitas pengelolaan Keuangan, Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, Kemandirian pengelolaan keuangan dan Kewajaran pengelolaan keuangan di Perusahaan Air Minum kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae kota Parepare. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan.

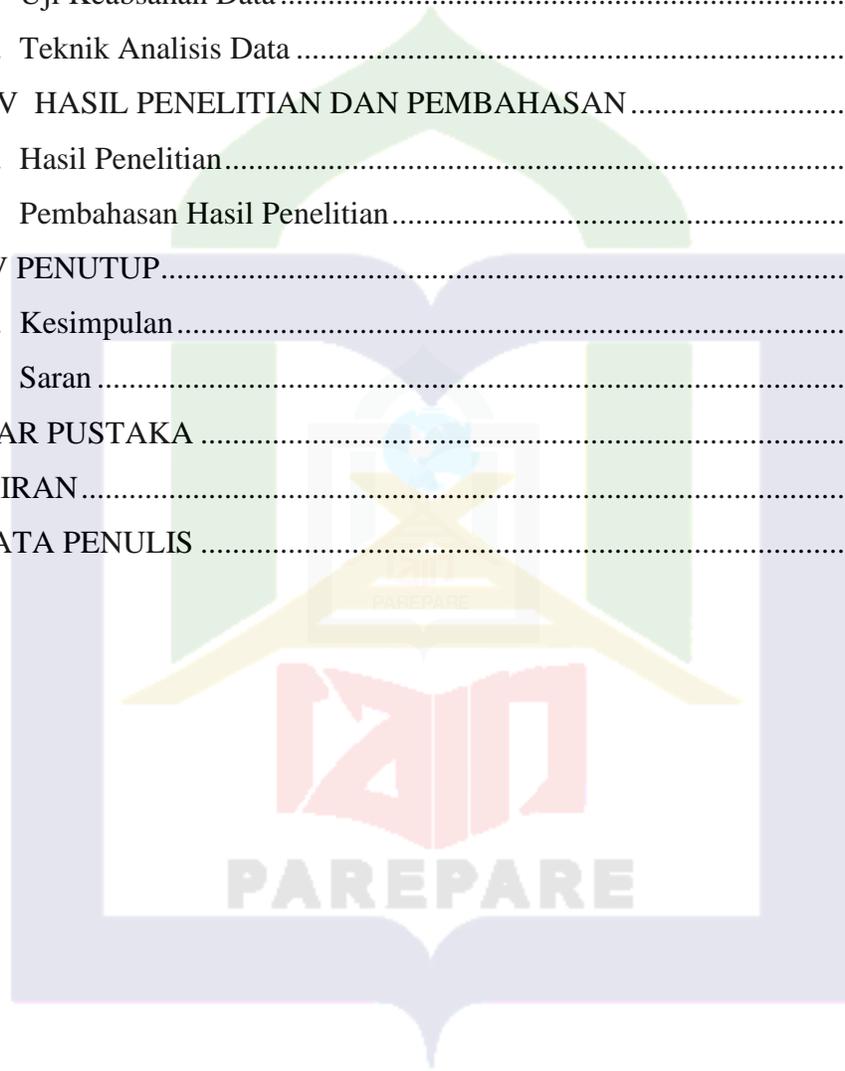
Hasil penelitian menyatakan bahwa 1) Transparansi pengelolaan keuangan di perusahaan air minum kota Parepare terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam keterbukaan, pengumpulan, dan pelaporan informasi terkait keuangan perusahaan. 2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan di perusahaan air minum kota Parepare terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam fungsi, sistem, struktur, dan pertanggung jawaban orang-orang perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana dengan efektif. 3) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di perusahaan air minum kota Parepare terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) Kemandirian pengelolaan keuangan di perusahaan air minum kota Parepare terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa masing-masing organ perusahaan menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. 5) Kewajaran pengelolaan keuangan di perusahaan air minum kota Parepare terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan juga memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Kata Kunci : **Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, Kewajaran.**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	13
1. Analisis	13
2. <i>Good Corporate Governance</i>	14
3. Pengelolaan Keuangan	20
4. Perusahaan.....	23
C. Tinjauan Konseptual.....	26
D. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30

B. Lokasi dan waktu penelitian	30
C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Uji Keabsahan Data	34
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian.....	37
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	67
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	88
BIODATA PENULIS	123



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Perkembangan Pelanggan PAM Tirta Karajae	4
2.1	Daftar Nama Informan PAM	33



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	29
3.1	Susunan Organisasi Manajemen PAM Tirta Karajae Kota Parepare	31



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrument Penelitian (Pedoman Wawancara)	88
2	Laporan Keuangan PAM 2022	100
3	Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur PAM Parepare	104
4	Dokumentasi Wawancara	109
5	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	112
6	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare	113
7	Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	114
8	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Perusahaan Air Minum Kota Parepare	115
9	Surat Keterangan Wawancara	116
10	Biodata Penulis	123

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ("").

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
دِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i

نَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
نُو	Kasrah dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوت : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُو	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥz lā bi khusus al-sabab

i. *Laḥz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ

Dīnullah

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swi.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mulai memperbincangkan tentang *corporate governance* sejak tahun 1997. Hal ini terjadi pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, bahkan bukan hanya Indonesia tetapi negara-negara di Asia. *Good governance* sendiri merupakan sebuah prinsip yang sangat universal, akhirnya menjadikannya sebagai rujukan, dan menjadi sistem karena selalu menyesuaikan dengan sistem hukum, keadaan, dan perkembangan kemajuan, serta kultur bangsa.¹

Good Corporate Governance, (GCG) adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). GCG didefinisikan sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.²

Menurut pasal 44 (1) permen BUMN 01/2011, BUMN wajib melakukan pengukuran atas kualitas penerapan GCG yang dilaksanakan berkala setiap 2 tahun dalam 2 bentuk yaitu penilaian (*assessment*) atas pelaksanaan GCG dan evaluasi (*review*) atas tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dari hasil penilaian sebelumnya.³ Pada prinsipnya yang melakukan evaluasi adalah BUMN itu sendiri

¹ Edi Wibowo. "Implementasi *Good Corporate Governance* di Indonesia". Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan. Vol. 10 No. 2. (2015).

² Rizky Fadhillah, "Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan dan Resiko Pembiayaan Di Bank Umum Syariah", Industrial research workshop and national seminar.

³ Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of corporate Governance): Revisi 0.5 (Jakarta: PT. Nindya Karya, 2020).

(penilaian mandiri), sedangkan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh penilai independen yang kompeten dan harus ditunjuk oleh dewan komisaris.

Penerapan GCG yang baik dapat memperkokoh kepercayaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut perusahaan menerapkan GCG yang terintegrasi dengan pengelolaan kepatuhan, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Penerapan ini menjadi penentu yang strategis bagi suatu perusahaan. Hal ini diharapkan agar dapat senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.⁴

Tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan kinerja operasional organisasi dan manajemen serta pemanfaatan peluang bisnis seoptimal mungkin, sehingga menjadi perusahaan perkebunan yang berdaya saing, makmur dan menghasilkan laba, sehingga dapat berperan dalam mensejahterakan karyawan. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan agribisnis sector perkebunan sesuai prinsip perusahaan yang sehat, kuat, dan tumbuh dalam skala usaha yang ekonomis. Menurut Maksum, manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah mempermudah proses pengambilan keputusan, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian

⁴ Sulistiowati dan Asrofi Langgeng N., “Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal”, Jurnal Monex, Vol. 6, No. 1, (2017)

membuktikan bahwa penerapan GCG mempengaruhi kinerja keuangan secara positif.⁵

Kelemahan pada penerapan GCG tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan dan kewajiban-kewajiban perusahaan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh komisaris dan auditor, serta kurangnya insentif untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui mekanisme persaingan yang *fair*. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya melaksanakan *corporate governance* demi terwujudnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik. Meski terdapat kelemahan dalam penerapan GCG tetapi sistem ini tetaplah sangat penting bagi perusahaan.⁶

Salah satu perusahaan di kota Parepare yang menerapkan prinsip GCG yaitu Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae. Perusahaan ini sebelumnya bernama PDAM kota Parepare, namun setelah DPRD Kota Parepare Bersama Pemerintah Kota Parepare menyetujui Rancangan Peraturann Daerah Kota tentang Perusahaan Umum Daerah Air Munum Kota Parepare ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perumda Air Minum Tirta KarajaE di Ruang Paripurna DPRD Kota Parepare. Berdasarkan hal tersebut, status hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). PDAM secara resmi berubah nama menjadi Perumda Air Minum (PAM) Tirta Karajae.⁷

Perusahaan air minum merupakan salah satu perusahaan daerah yang dimiliki pemerintah yang bertugas menyediakan air minum bagi masyarakat.

⁵ Nurmala Sari, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Medan, 2017).

⁶ Merida, Pengaruh Good Corporate Governance dan Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Perbankan, Jurnal Penelitian, Pengembangan Ilmu Manajemen dan Akuntansi, Vol. 15, No. 1, (2017).

⁷ Redaksi, PDAM Berubah Status Jadi Perumda, Firdaus Apresiasi Walikota Parepare, Media Suara Sulsei, 2021 <https://voicesulsei.com/pdam-berubah-status-jadi-perumda-firdaus-apresiasi-wali-kota-parepare/> (5 Maret 2024)

Pengelolaan PAM tentunya harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, baik itu dalam pengelolaan keuangan, aspek operasional dan administrasi. Hal ini dikarenakan PAM dibiayai oleh pemerintah yang bersumber dari uang masyarakat.⁸ Setiap tahunnya pasti terdapat peningkatan pelanggan yang menggunakan jasa perusahaan air minum. Adapun data jumlah pelanggan PAM Tirta Karajae sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Pelanggan PAM Tirta Karajae Kota Parepare

TAHUN	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK			KELOMPOK		KELOMPOK	TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7		
	(K1)	(K2)	(K3.A)	(K3.B)	(K3.C)	(K4.A)	(K4.B)	(K5)	
2019	106	15	727	16.489	1.644	431	75	3	19.490
2020	119	15	630	17.420	2.956	536	86	3	21.756
2021	123	19	385	16.264	4.923	707	84	3	22.508
2022	132	16	342	17.059	4.885	978	127	3	23.542

Sumber Data: pdamparepare.co.id

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa setiap tahunnya terdapat peningkatan jumlah pelanggan. Total pelanggan aktif pada tahun 2022 sebanyak 23.542 pelanggan, adapun pelanggan aktif pada tahun 2023 sebanyak 24.647 pelanggan. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa dari tahun 2022 ke tahun 2023 terdapat 925 pelanggan baru yang memakai perusahaan air minum Tirta Karajae.⁹ Data menunjukkan adanya keterbukaan perusahaan terkait informasi jumlah pelanggan setiap tahunnya, menjadi salah satu penerapan prinsip GCG yakni keterbukaan informasi. Semakin meningkatnya jumlah pelanggan membuat Perusahaan tersebut meningkatkan sumber pendapatannya.

Pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban. Laporan

⁸ Sulistiowati dan Asrofi Langgeng N., “Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal”, Jurnal Monex, Vol. 6, No. 1, (2017).

⁹ PAM Tirta Karajae, <https://pdamparepare.co.id/data-pelanggan-1-11> (27 Februari 2024).

terkait pengelolaan keuangan dapat mengungkapkan bagaimana kondisi suatu perusahaan.¹⁰

Pengungkapan laporan yang transparan dan akurat dapat menjadi informasi yang sangat penting bagi konsumen. Namun perlu diketahui bahwa pada PAM Tirta Karajae, laporan keuangan tidak mudah untuk diakses oleh setiap orang karena menjadi rahasia perusahaan. Transparansi yang diperlihatkan oleh perusahaan terkait info tagihan yang dimiliki oleh setiap pelanggan. Dimana hal ini dapat dilihat pada halaman website PAM Tirta Karajae. Pada dasarnya laporan keuangan hanya dapat menyajikan data keuangan saja, data non keuangan tidak tergambar, maka dengan adanya prinsip GCG dapat digunakan sebagai alat untuk menggambarkan data non keuangan. Hal ini berguna untuk peningkatan kinerja perusahaan.¹¹

Pada praktek pengelolaan keuangan perusahaan, terkadang perusahaan secara sengaja atau tidak sengaja atas tindakan yang mereka lakukan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Pada saat kepala perusahaan tersebut menetapkan suatu kebijakan, kadang terdapat suatu kasus dimana terjadi tindak korupsi, kolusi dan nepotisme yang bisa terjadi baik sengaja maupun tidak disengaja oleh pihak terkait. Kasus tersebut dapat terjadi karena mereka kurang memahami pedoman dalam pengelolaan keuangan terutama keuangan perusahaan sehingga, pihak tersebut merugikan keuangan perusahaan dan terjatuh dalam tindak korupsi, kolusi dan nepotisme dan pada akhirnya harus mengganti kerugian atas apa yang terjadi dan mencoreng citra pegawai perusahaan.¹²

¹⁰ Anik Yuesti dan Putu Kepramareni, *Manajemen Keuangan Jendela Pengelolaan Bisnis*, (Bali: CV. Noah Aletheia, 2019), hal. 71-72.

¹¹ Astri Furqani, “*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Sumenep*”, *Jurnal Performance Bisnis dan Akuntansi*, Vol.4, No. 1, (2014).

¹² Crystha Armereo, “*Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang*”, *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 2, (2021).

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang *Good Corporate Governance* menunjukkan hasil bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih sudah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dengan sangat baik dengan rata-rata skor penilaian sebesar 87,98%. Hal ini dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih telah menerapkan *Good Corporate Governance* prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran dengan sangat baik).¹³

Berdasarkan hal di atas diharapkan bahwa dengan penerapan prinsip-prinsip GCG dapat membuat perusahaan lebih naik dan sehat. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sangat penting dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip dari *Good Corporate Governance* juga berperan sebagai pengendali bagi perusahaan untuk menjalankan usaha yang baik dan terbebas dari tindak korupsi, kolusi dan nepotisme.¹⁴

Berdasarkan beberapa penjelasan dan masalah yang dipaparkan di atas peneliti bermaksud menganalisis *Good Corporate Governance* pada bagian keuangan perusahaan, perusahaan air minum tirta karajae yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja dari perusahaan tersebut, apakah pengelolaan yang dilakukan sudah transparan, bertanggung jawab, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu penjabaran di atas menjelaskan satu upaya perusahaan dalam menerapkan prinsip transparansi, maka penelitian ini peneliti lakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip GCG lainnya. Maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul: “Analisis *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Keuangan di perusahaan air minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare”.

¹³ Masri Ermawijaya, “Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih”, Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmanyah (JIAR), Vol. 3, No.2, (2020).

¹⁴ Crystha Armereo, “Analisis *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang”, Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9, No. 2, (2021).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan di penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan di perusahaan air minum kota Parepare?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan di perusahaan air minum kota Parepare?
3. Bagaimana pertanggung jawaban pengelolaan keuangan di perusahaan air minum kota Parepare?
4. Bagaimana kemandirian pengelolaan keuangan di perusahaan air minum kota Parepare?
5. Bagaimana kewajaran pengelolaan keuangan di perusahaan air minum kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan transparansi pengelolaan keuangan di perusahaan air minum kota Parepare
2. Untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan keuangan di perusahaan air minum kota Parepare
3. Untuk mendeskripsikan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan di perusahaan air minum kota Parepare
4. Untuk mendeskripsikan kemandirian pengelolaan keuangan di perusahaan air minum kota Parepare
5. Untuk mendeskripsikan kewajaran pengelolaan keuangan di perusahaan air minum kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk kegunaan teoritis, dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan teoritis

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya pada masa yang akan datang. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan literatur bacaan bagi mahasiswa dalam hal bisnis.

b. Kegunaan praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi kepada masyarakat tentang keterbukaan informasi yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi pemilik perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada pengelolaan keuangan perusahaan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu “Pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Bank Rakyat Indonesia cabang kota Prabumulih” oleh Masri Ermawijaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan keuangan pada PT Bank Rakyat Indonesia cabang kota Prabumulih. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data adalah teknik analisa data kuantitatif dengan melakukan perhitungan atas kuesioner yang disebarakan terhadap 25 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih sudah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dengan sangat baik dengan rata-rata skor penilaian sebesar 87,98%. Hal ini dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih telah menerapkan *Good Corporate Governance* (prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran dengan sangat baik).¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian dimana penelitian ini sama sama meneliti terkait pengelolaan keuangan dan *Good Corporate Governance*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada subjek penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu melakukan penelitian pada PT Bank Rakyat Indonesia cabang kota Prabumulih dengan teknik Analisa data kuantitatif dengan melakukan perhitungan atas kuesioner sedangkan penulis memilih Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare dengan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara.

¹⁵ Masri Ermawijaya, “Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih”, Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmanyah (JIAR), Vol. 3, No.2, (2020).

Penelitian terdahulu “Analisis Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kemungkinan Financial Distress” oleh Rusdan Radifan. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk menguji pengaruh dari karakteristik *Good Corporate Governance* seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independent, jumlah dewan direksi, ukuran komite audit, komposisi komisaris independent dalam komite audit, jumlah pertemuan komite audit, dan jumlah ahli keuangan dalam komite audit terhadap kemungkinan financial distress. Teknik analisis data yang digunakan peneliti terdahulu adalah regresi logistic. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, jumlah dewan direksi, komposisi komisaris independen dalam komite audit, jumlah pertemuan komite audit, dan jumlah ahli keuangan dalam komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemungkinan financial distress, sedangkan variabel kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya financial distress.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama membahas tentang *Good Corporate Governance*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, dimana penulis berfokus pada analisis penerapan *Good Corporate Governance* pada pengelolaan keuangan perusahaan air minum. Selain itu metode yang digunakan oleh penulis berbeda, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjabarkan hasil analisis.

Penelitian terdahulu “Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal” oleh Sulistiowati dan Asrofi Langgeng Nurmnsyah. Penelitian ini bertujuan untuk

¹⁶ Rusdan Radifan, “Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kemungkinan Financial Distress”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomika dan Bisnis: Semarang, 2015).

mengetahui bagaimana kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kabupaten Tegal yang ditinjau dari rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas dengan menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan rasio keuangan menunjukkan bahwa rasio aktiva lancar terhadap hutang lancar pada tahun 2013 sebesar 6,43, tahun 2014 sebesar 5,28, dan tahun 2015 sebesar 15,1. Rasio total aktiva terhadap total hutang pada tahun 2013 sebesar 22,88, tahun 2014 sebesar 14,66, dan tahun 2015 sebesar 33,13. Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air pada tahun 2013 sebesar 2,06, tahun 2014 sebesar 2,16x, dan tahun 2015 sebesar 2,31x. Rasio biaya usaha terhadap pendapatan usaha pada tahun 2013 sebesar 0,80x, tahun 2014 sebesar 0,79x, dan tahun 2015 sebesar 0,78x. rasio laba sebelum pajak terhadap pendapatan usaha pada tahun 2013 sebesar 18,09%, tahun 2014 sebesar 21,26%, dan tahun 2015 sebesar 23,63%. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Tegal pada 2013-2015 adalah belum maksimal.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada perusahaan yakni terkait perusahaan air minum. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan yang digunakan, dimana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif. Perbedaan selanjutnya adalah fokus penelitian, penelitian peneliti berfokus pada penerapan *good corporate governance* pada pengelolaan keuangan Perusahaan Air Minum. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas dengan menggunakan data sekunder.

¹⁷ Sulistiowati dan Asrofi Langgeng N., "Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal", Jurnal Monex, Vol.6, No.1, (2017).

Keempat, penelitian terdahulu “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Badan Milik Desa (BUMDES) Desa Ridan Permai Kabupaten Kampar” oleh Yulia Putri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, hambatan-hambatan dalam penerapan *Good Corporate Governance*, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaannya pada BUMDES Ridan Permai. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* belum terlaksana sepenuhnya. Prinsip transparansi dan akuntabilitas belum berjalan dengan baik. Sedangkan prinsip responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan sudah berjalan dengan baik sesuai indikator. Hambatan yang dihadapi BUMDes adalah berkaitan dengan penyampaian informasi kepada nasabah tentang dana yang digulirkan dan sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan berkaitan transparansi yaitu melakukan sosialisasi agar terciptanya pemahaman tentang produk pelayanan pada BUMDes Ridan Permai. Sedangkan upaya yang dilakukan berkaitan akuntabilitas yaitu memberikan penyadaran dan motivasi terhadap masyarakat menuju kebangkitan sumber daya manusia.¹⁸

Persamaan penelitian terletak pada analisis penerapan GCG dan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Perbedaan penelitian pertama terletak pada lokasi penelitian, dan fokus penelitian. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui apakah prinsip GCG benar-benar diterapkan atau tidak jika tidak, apa yang menyebabkan hal tersebut belum diterapkan.

¹⁸ Yulia Putri, *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Badan Milik Desa (BUMDES) Desa Ridan Permai Kabupaten Kampar*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial: Riau, 2022).

Kelima, penelitian terdahulu “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022” oleh Nadia Putri Maharani. Tujuan penelitian yaitu untuk menguji GCG terhadap nilai Perusahaan. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari website Bursa efek Indonesia tahun 2020-2022 dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 19 perusahaan perbankan yang dijadikan sampel.¹⁹

Persamaan penelitian ini terletak pada penerapan *Good Corporate Governance*. Adapun perbedaannya terletak pada variable, fokus penelitian, metode, dan teknik analisis data yang berbeda. Penelitian terdahulu berfokus pada pengaruh dari penerapan GCG terhadap nilai Perusahaan yang diukur menggunakan *price to book value* (PBV). Sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip GCG pada pengelolaan keuangan PAM Tirta Karajae.

B. Tinjauan Teori

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁰ Dapat dikatakan bahwa analisis kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis

¹⁹ Nadia Putri Maharani, Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi: Palembang, 2023).

²⁰ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (5 Maret 2024)

diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.

Analisis data merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data untuk mencapai kesimpulan. Sederhananya analisis menjadi tahapan dalam proses penelitian dimana data-data yang dikumpulkan akan dilakukan interpretasi atau menguraikan data untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan pengertian ini, diketahui bahwa analisis data menjadi proses penting dalam penelitian ini, proses dalam mengolah data menjadi informasi berharga.

2. *Good Corporate Governance*

a. Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance berasal dari bahasa Inggris, yaitu *good* yang berarti baik, *corporate* berarti perusahaan dan *governance* artinya pengaturan. Secara umum, istilah *Good Corporate Governance* diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. *Good Corporate Governance* ialah sebuah sistem tata kelola organisasi berisi peraturan dimana mengatur terkait hubungan antara kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sistem ini merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan organisasi dan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) bagi setiap pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*).²¹ *Stakeholder* sendiri merupakan pihak yang berada dalam masyarakat, baik perorangan atau kelompok yang memiliki

²¹ Crystha Armereo, "Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang", *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 2, (2021).

sebuah kepentingan dalam suatu perusahaan yang saling berhubungan dan terikat.

b. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Kesadaran akan pentingnya pengelolaan sebuah perusahaan yang baik sangatlah penting dan diharapkan terdapat di dalam setiap perusahaan. Maka dari itu *good governance* menjadi mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan pengaplikasiannya diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efektif dan efisien. Adapun lima prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* yang harus diperhatikan berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2006 yaitu sebagai berikut:²²

1) Transparansi (*Transparency*)

Pada penerapan GCG prinsip dasar ini harus menyediakan informasi materil dan relevan.²³ Informasi tersebut diharapkan mudah diakses dan dipahami oleh orang yang berkepentingan dalam menjalankan bisnis. Perusahaan juga diharapkan mempunyai inisiatif sendiri untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada prinsip ini, transparansi dapat diartikan bahwa perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, menyediakan informasi yang memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

Ditegaskan bahwa Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi

²² Hendrik Manosoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Norlive Kharisma Indonesia, (2016), hal. 22-26.

²³ Efrizal Syofyan, *Good Corporate Governance (GCG)*, Malang: Unisma Press (Universitas Islam Malang, 2021), hal. 108-109.

perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.²⁴

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Pada prinsip akuntabilitas mengandung makna bahwa perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Maka dari itu perlu untuk mengelola perusahaan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Akuntabilitas juga terkait kejelasan terkait fungsi, sistem, struktur, dan pertanggung jawaban orang-orang perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana dengan efektif. Hal ini diwujudkan dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu dan cara yang tepat.

Berdasarkan prinsip ini, perlu untuk menetapkan detail tugas serta tanggung jawab dari masing-masing bagian di perusahaan dan semua karyawan secara jelas setara dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan. Perusahaan harus menyakini bahwa setiap bagian dalam perusahaan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dalam pelaksanaan GCG.

Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Juga, perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta

²⁴ Hendrik Manosoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Norlive Kharisma Indonesia, (2016), hal. 23-24

memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3) Pertanggung Jawaban (*Responsibility*)

Prinsip dasar pertanggung Jawaban (*Responsibility*) menjelaskan bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Pertanggung jawaban ialah kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diwujudkan dengan kesadaran akan tanggung jawab dari adanya wewenang, sadar akan tanggung jawab sosial, menjadi profesional dan menjunjung etika dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan memelihara lingkungan bisnis. Pelaksanaan prinsip ini, diharapkan setiap bagian atau anggota dalam perusahaan harus berhati-hati dan memastikan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan.

4) Kemandirian (*Independency*)

Prinsip dasar kemandirian adalah keadaan perusahaan yang dikelola dengan profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus dikelola secara independent sehingga setiap bidang dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman pelaksanaan asas ini adalah bahwa masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Kemudian, masing masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Kewajaran dapat juga disebut dengan kesetaraan, dimana ini merujuk pada perlakuan yang adil dan setara. Setara dalam memenuhi hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵ Prinsip ini diwujudkan dengan cara membuat peraturan korporasi yang akan melindungi kepentingan minoritas.

Dalam pelaksanaan prinsip ini, Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup 27 kedudukan masing-masing. Juga, perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.²⁶

Selain itu diwujudkan juga dengan membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-kebijakan yang

²⁵ Thomas S. Kaihatu, “*Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*”, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 8.No. 1, (2015).

²⁶ Hendrik Manosoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Norlive Kharisma Indonesia, (2016), hal. 26-27.

melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam. Membuat *self-dealing* dan konflik kepentingan, menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Komite, termasuk sistem remunerasi menyajikan informasi secara wajar/pengungkapan material apa pun mengedepankan *Equal Job Opportunity*.²⁷

c. Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Setiap sistem pasti memiliki tujuan dan manfaatnya, begitu juga dengan tata kelola *Good Corporate Governance*. Manfaat dari sistem ini sesuai dengan *forum for Corporate Governance in Indonesian* (FCGI) yakni sebagai berikut:²⁸

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan dengan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*, serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.
- 2) Memudahkan dalam memperoleh dana pembiayaan, dan meningkatkan *Corporate value*.
- 3) Investor dapat mempercayai perusahaan dan menanamkan modal.
- 4) Kepuasan pemegang saham akan kinerja perusahaan dan meningkatkan *dividen* dan *value*.

Adapun tujuan dari GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yaitu sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan praktik bisnis sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten.
- 2) Mewujudkan kemandirian dalam membuat keputusan sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab setiap pimpinan.

²⁷ Efrizal Syofyan, *Good Corporate Governance (GCG)*, Malang: Unisma Press (Universitas Islam Malang, 2021), hal. 107.

²⁸ Julio A. C. Madika dkk, Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Bank Sulutgo Manado, *Jurnal EMBA*, Vol. 9 No. 3, (2021).

- 3) Memaksimalkan value perusahaan
- 4) Memastikan pengelolaan dilakukan dengan professional, transparan dan efisien.
- 5) Memastikan pegawai berperan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.²⁹

Konsep *Good Corporate Governance* muncul berdasarkan *Agency theory* yang ini memandang bahwa dalam suatu perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi yaitu pihak manajemen sebagai agen dan pihak pemilik sebagai principal dimana pihak manajemen (agen) lebih mengetahui keadaan sebenarnya mengenai perusahaan dibanding pihak pemilik (prinsipal). Pihak manajemen harus mengungkapkan informasi perusahaan kepada pihak pemilik (prinsipal) namun terkadang informasi yang disampaikan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dari perusahaan sehingga hal ini akan menimbulkan permasalahan konflik kepentingan. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Sehingga dengan adanya *Good Corporate Governance* permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer akan teratasi.³⁰

3. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan merupakan istilah, yang dimana berasal dari kata “kelola” yang berarti segala usaha yang memiliki tujuan untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.³¹ Sedangkan keuangan merupakan ilmu

²⁹ Adrian Sutedi. *Good Corporate Governance*. Edisi 1. Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika, (2011), hal 34.

³⁰ Nadya Nurul S. dan Isfenti Sadalia, “*Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan*”, *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*, Vol. 1 No. 2, (2021).

³¹ Haryoso, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Persada, 1997) hal.121.

dan kemampuan dalam mengendalikan uang yang dapat mempengaruhi keberadaan setiap orang dan organisasi. Keuangan sendiri berkaitan dengan lembaga, pasar, dan instrumen lain yang terlibat dalam proses transfer uang baik diantara personal maupun antar bisnis dan pemerintah.³²

Pengelolaan keuangan adalah aktivitas keuangan yang berkaitan dengan perencanaan, pencatatan, pengendalian, dan pelaporan keuangan yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup suatu bisnis yang dijalankannya. Adapun fungsi pengelolaan keuangan untuk melakukan perencanaan keuangan berkaitan dengan perencanaan aliran kas dan laba perusahaan; untuk mengalokasikan biaya usahanya secara tepat; sebagai bahan evaluasi keuangan jika terdapat selisih antara perencanaan dengan aktualnya; dan dijadikan sebagai indikator pelaporan keuangan. Menurut Kuswadi ada empat kerangka dasar di dalam pengelolaan keuangan yaitu:³³

a. Perencanaan

Aktivitas perencanaan keuangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan tertentu yang hendak dicapai oleh perusahaan. Indikator yang terdapat di dalam perencanaan keuangan, yaitu dengan merumuskan anggaran jangka panjang. Dengan adanya perumusan penganggaran keuangan yang baik, sebuah usaha akan berjalan dengan baik dan lebih banyak usaha yang akan berhasil.

b. Pencatatan

Aktivitas pencatatan pemasukan dan pengeluaran keuangan mengenai segala aktivitas transaksi keuangan yang dilakukan di dalam suatu usaha secara rinci. Pencatatan transaksi keuangan diperlukan di dalam memenuhi kebutuhan usaha, agar dapat memberikan informasi keuangan secara relevan kepada para pengguna laporan keuangan, serta

³² Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian, *Manajemen Keuangan*, Edisi Keempat (Jakarta: Literata Lintas Media, 2003), hal. 34.

³³ Kuswadi, *Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2005), hal 25-27.

dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar kedepannya.

c. Pelaporan

Tahapan setelah pencatatan keuangan selesai, dan informasinya digunakan oleh para pemangku kepentingan dan publik. Kerangka pelaporan keuangan harus mempunyai karakteristik keuangan yang disajikan secara transparan, disajikan secara lengkap, dan bersifat konsisten. Indikator pada pelaporan keuangan ini meliputi laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan.

d. Pengendalian

Tahapan ini dilakukan untuk membandingkan dan mengevaluasi perencanaan keuangan yang direncanakan dengan perolehan laba aktual yang tujuannya untuk memperoleh umpan balik. Pengendalian keuangan ini diperlukan untuk setiap fase di dalam usaha untuk mencapai kesuksesan, dan disesuaikan dengan kebutuhan porsi usahanya. Ketika ukuran usahanya semakin berkembang, maka pengendalian keuangan yang diperlukan akan semakin kompleks.³⁴

Pengelolaan keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Baik itu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Pengelolaan keuangan dikatakan baik jika dilakukan dengan adil, transparan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Perusahaan yang menjaga kepercayaan masyarakat menjadikannya perusahaan yang dapat menjaga etika dalam berbisnis.

QS. Al-Baqarah :2/188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

³⁴ Kevan hidayat, Elvina Gunawan, Yuliana Gunawan, Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Bisnis di Masa Pandemi pada Pelaku Bisnis Generasi Milenial di Wilayah Bandung, Jurnal akuntansi, Vol. 14 No. 01, (2022).

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”³⁵

Ayat di atas berisi tentang peringatan untuk menghormati harta orang lain seperti menghormati harta Sewenang-wenang terhadap harta orang lain sama halnya dengan melakukan kejahatan terhadap seluruh umat manusia. Berdasarkan hal ini perlunya sebuah bisnis menjaga etika dan tetap menghargai orang-orang walau orang tersebut seorang konsumen.

4. Perusahaan

Perusahaan merupakan bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah NKRI yang bertujuan memperoleh keuntungan.³⁶ Tentunya setiap perusahaan memiliki tujuan yang akan dicapai, baik itu tujuan jangka Panjang maupun jangka pendek. Menurut ahli keuangan, tujuan didirikannya perusahaan tidak jauh berbeda satu sama lain, hanya cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang berbeda. Adapun tujuan perusahaan menurut ahli keuangan sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan nilai perusahaan
- b. Memaksimalkan keuntungan atau laba
- c. Menciptakan dan memberikan kesejahteraan bagi *stakeholder*
- d. Menciptakan citra perusahaan
- e. Meningkatkan tanggung jawab sosial.³⁷

³⁵ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

³⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nuansa Aylia, 2006, hal. 12

³⁷ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 8

Tercapai tidaknya tujuan dari berdirinya sebuah perusahaan diukur dari harga saham perusahaan dari waktu ke waktu. Dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada stakeholder, perusahaan harus mampu memaksimalkan laba atau keuntungan. Dalam hal ini diwujudkan dengan meningkatkan penghasilan perusahaan setelah pajak, dengan keuntungan yang maksimal, maka dari itu tujuan ini dapat dicapai.

Tujuan perusahaan dalam meningkatkan citranya dapat dicapai dengan mengubah pandangan masyarakat dan pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Memiliki sikap dan pandangan yang positif terhadap perusahaan, sehingga aktivitas akan memperoleh kepercayaan yang baik. Mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak dengan dan diharapkan perusahaan dapat berdiri dalam waktu yang lama.³⁸

Perusahaan sendiri memiliki beberapa klasifikasi, menurut Jamal Wiwoho terdapat klasifikasi perusahaan berdasarkan dengan bentuk usaha atau status hukum dari perusahaan. Hal ini dapat menjelaskan dengan tegas statud dan bentuk usaha perusahaan tersebut. Berdasarkan klasifikasi tersebut, yang termasuk bentuk usaha yang berbadan hukum ialah PT, Koperasi, Perusahaan Negara (BUMN), dan Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).³⁹

a. Perusahaan Daerah (BUMD)

BUMD atau yang dikenal dengan perusahaan daerah di Indonesia mulai ada pada zaman Hindia Belanda. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaann daerah menyebutkan bahwa perusahaann daerah adalah perusahaan yag didirikan dengan modal yang sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang

³⁸ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 9.

³⁹ Yudho Taruno M., *Tata Kelola BUMD: Konsep, Kebijakan, dan Penerapan Good Corporate Governance*, Malang: Intrans Publishing, (2017), hal. 5.

dipisahkan.⁴⁰ Kekayaan Daerah yang dipisahkan berarti kekayaan Daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui Anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan tersendiri.

Adapun menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam UU ini ketentuan terkait dengan BUMD diatur dalam pasal 331 sampai Pasal 341 (sepuluh pasal).⁴¹ Dimana pengaturan secara detail diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah (PP). Pada UU ini membagi BUMD menjadi dua bentuk yakni berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Maka dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 secara otomatis mencaabut UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah serta UU pemerintahan daerah sebelumnya.⁴²

Menurut M. Natzir Said BUMD memiliki sistem pengelompokan berdasarkan kepemilikan modal yang terbagi menjadi tiga yang masih dijalankan BUMD yang ada di daerah berdasarkan jenis usahanya. Adapun jenis tersebut antara lain: dibidang perbankan, PDAM, dan aneka usaha. Adapun berdasarkan status badan hukumnya BUMD dalam UU dibagi menjadi dua yaitu non-persero, dan persero.⁴³

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang permodalannya khusus karena milik pemerintah daerah.

⁴⁰ Pasal 2 Undang-Undang No.5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/50675/uu-no-5-tahun-1962> (5 Maret 2024).

⁴¹ Yudho Taruno M., Tata Kelola BUMD: Konsep, Kebijakan, dan Penerapan Good Corporate Governance, Malang: Intrans Publishing, (2017), hal. 14.

⁴² Yudho Taruno M., Tata Kelola BUMD: Konsep, Kebijakan, dan Penerapan Good Corporate Governance, Malang: Intrans Publishing, (2017), hal 15.

⁴³ Yudho Taruno M., Tata Kelola BUMD: Konsep, Kebijakan, dan Penerapan Good Corporate Governance, Malang: Intrans Publishing, (2017), hal 20.

Kebijakan utama dalam mengelola BUMD harus bisa mendapatkan persetujuan dari eksekutif dan legislative terutama dalam hal permodalan. Akibatnya penambahan modal sangat bergantung pada kondisi dan keadaan keuangan pemerintah daerah serta dinamika politik yang berkembang yang memiliki konsekuensi permohonan disetujui atau ditolak.⁴⁴ Kondisi ini akan memakan waktu dan proses yang cukup Panjang, dari segi bisnis dapat dikatakan kondisi ini menjadi urang efektif.

b. Perusahaan Air Minum (PAM).

Perusahaan air minum merupakan suatu perusahaan yang mengelolah air untuk masyarakat. Adapun status hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Perda ini merupakan perda perubahan dari perda no.1 tahun 1975 tentang PDAM kemudian berdasarkan PP 54 tahun 2017 yang menjadi turunan dari UU 23 tahun 2014 mengamankan untuk status PDAM di ubah menjadi Perusahaan Umum Daerah. Terdapat beberapa perbedaan yang mendasar dari sebelumnya yakni saat ini menjadi perusahaan umum yang membolehkan PDAM membentuk unit bisnis baru yang dapat memberi keuntungan. Kemudian posisi pemerintah daerah dalam hal ini Walikota semakin diperkuat posisinya menjadi Kuasa Pemilik Modal (KPM).

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual menjelaskan hubungan atau kaitan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara akurat tentang dari masalah yang diteliti.

⁴⁴ Yudho Taruno M., Tata Kelola BUMD: Konsep, Kebijakan, dan Penerapan Good Corporate Governance, Malang: Intrans Publishing, (2017), Hal.20-21

1. Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan. Maka berdasarkan hal ini peneliti melakukan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan *good corporate governance* pada perusahaan air minum di Kota Parepare.

2. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance merupakan sistem tata kelola organisasi berisi peraturan dimana mengatur terkait hubungan antara kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sistem ini merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan organisasi dan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) bagi setiap pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*).⁴⁵ Dalam penelitian yang dimaksud *Good Corporate Governance* ialah sistem tata kelola Perusahaan, pada perusahaan air minum Tirta Karajae kota Parepare berdasarkan lima prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kewajaran.

3. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan aktivitas keuangan yang berkaitan dengan perencanaan, pencatatan, pengendalian, dan pelaporan keuangan. pengelolaan sangat diperlukan dalam keputusan Perusahaan, dan merupakan penentuan ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan. Dalam penelitian ini pengelolaan keuangan yang dimaksud

⁴⁵ Crystha Armereo, “Analisis *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang”, *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9.2, (2021).

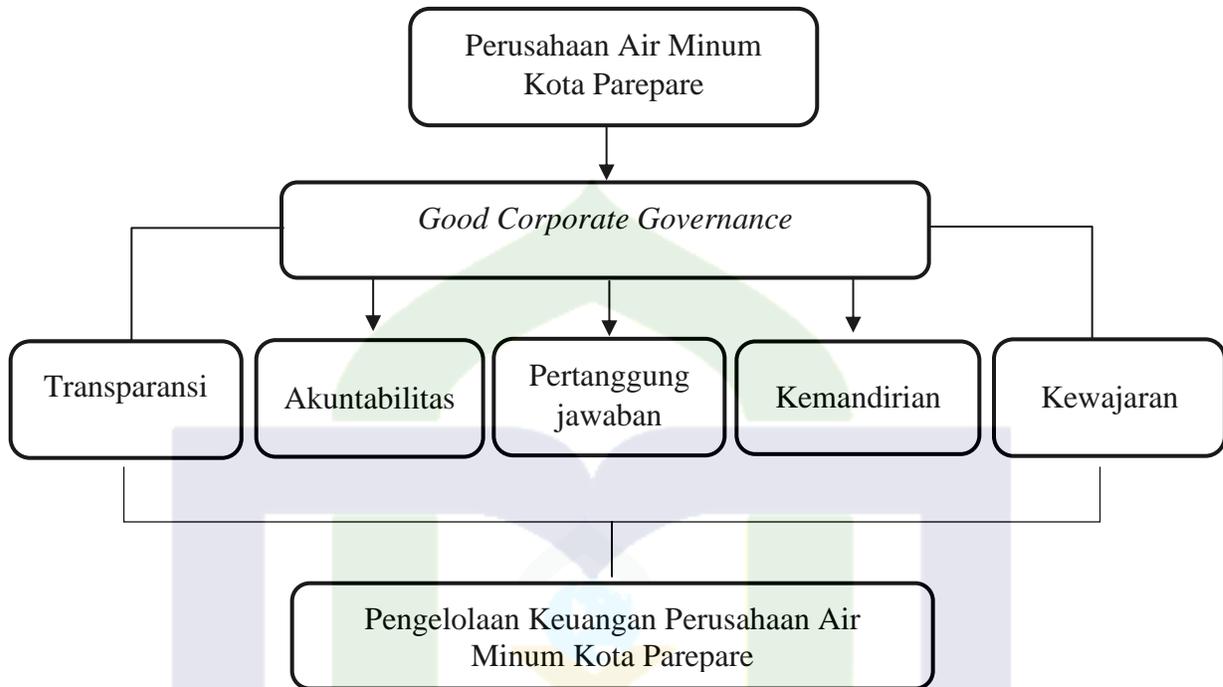
yaitu pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip dari *Good Corporate Governance*.

4. Perusahaan

Perusahaan merupakan bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha dan bersifat tetap, terus menerus didirikan yang bertujuan untuk memperoleh keuangan. Dalam penelitian ini perusahaan yang dimaksud ialah perusahaan daerah atau disebut juga Badan Usaha Milik Daerah. Dimana salah satu jenis yang dimiliki oleh BUMD yaitu Perusahaan air minum atau PAM yaitu PAM Tirta Karajae.

D. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah sebuah model konseptual tentang bagaimana teori dihubungkan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Maka kerangka pikir dapat dipahami sebagai sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini merupakan bagan kerangka berpikir untuk memahami landasan berfikir dari penelitian ini :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Maksud dari bagan kerangka pikir penulis adalah penulis ingin meneliti pada perusahaan air minum kota Parepare, tentang bagaimana *Good Corporate Governance* perusahaan tersebut. Pada penelitian ini menggunakan *Good Corporate Governance* memiliki 5 indikator yaitu, transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kewajaran. Teori inilah yang digunakan penulis untuk menganalisis *Good Corporate Governance* pada pengelolaan keuangan perusahaan air minum.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai sebuah hasil dan tujuan dari penelitian ini, diperlukan sebuah metode penelitian guna mendukung sistematis penelitian ini. Adapun hal-hal yang dibahas pada bab ini adalah pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan penyajian data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan dengan maksud untuk memahami fenomena, apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya dengan menciptakan gambaran secara menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata. Hasil penelitian dilaporkan dengan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.⁴⁶ Adapun tujuan dari penelitian kualitatif untuk mendapatkan sebuah pemahaman secara mendalam bukan hanya mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas. Tujuan lain dari penelitian ini yaitu penggambaran terkait objek penelitian, mengungkapkan makna di balik fenomena, dan menjelaskan fenomena yang terjadi.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian dimana penelitian ini diadakan di kantor Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae, Jl. Tirta Dharma No.1 kel. Ujung Baru, kec. Soreang, kota Parepare, Sulsel, 91113.

⁴⁶Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol. 2 No. 1, (2021).



Gambar 3.1. Susunan Organisasi Manajemen PAM Tirta Karajae Kota Parepare

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei – Juni 2024

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini difokuskan pada penerapan *Good Corporate Governance* pada pengelolaan keuangan perusahaan, dengan kriteria subjek penelitian sebagai berikut :

1. Subjek penelitian ini berasal dari pegawai Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare;
2. Subjek penelitian dari pegawai bagian keuangan perusahaan dan Pelanggan PAM Kota Parepare.
3. Objek penelitian berfokus pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada bagian pengelolaan keuangan PAM Tirta Karajae kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang ditemukan oleh penulis secara langsung atau dari tangan pertama. Sedangkan data sekunder ialah data yang ditemukan oleh peneliti dari sumber

yang sudah ada. Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data Primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang diperoleh dari data penelitian yang secara langsung dari sumber aslinya yaitu mengambil data melalui wawancara mendalam (*in depth interview*), dan observasi.

2. Data sekunder

Data sekunder menurut sugiyono adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Pada penelitian ini, data sekundernya ialah hasil penelitian terdahulu (Studi kepustakaan), dan dokumentasi. Adapun data sekunder penelitian ini diperoleh dari Kantor Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae, dari jurnal, skripsi.⁴⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis terlibat langsung di lokasi penelitian atau penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berbicara kepada narasumber. Percakapan yang dilakukan dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung seperti melalui telepon, internet, atau

⁴⁷ Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&H*. (Bandung: Alfabeta, 2013) hal. 89.

surat (wawancara tertulis termasuk lewat e-mail dan sms).⁴⁸ Informan yang terlibat dalam penelitian bersifat sukarela. Dimana sebelum melakukan wawancara dengan informan, penulis terlebih dahulu menjelaskan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini pihak yang akan diwawancarai yaitu staf bagian keuangan pada Perusahaan air minum, informan tersebut diantaranya:

Tabel 2.1.
Daftar Nama Informan PAM

No	Informan	Keterangan
1	Rahman Ngara, S.E.	PLH Direktur & PLT Manager Keuangan
2	Marwah Pawe, S.E.	Assisten Manager Aset
3	Wiwiek Hastya, S.M.	Assisten Manager Pembukuan & Akuntansi
4	Muh. Arifin	Karyawan Bagian Keuangan
5	Habibah	Pelanggan PAM
6	Hernan	Pelanggan PAM
7	Suharsih, S.Pd.	Pelanggan PAM

2. Observasi

Observasi dalam penelitian didefinisikan sebagai proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis mencari data yang

⁴⁸ Asep Syamsul M romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), hal. 158.

dapat digunakan untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati serta makna kejadian berdasarkan pandangan individu yang terlibat tersebut.⁴⁹ Penulis dapat memperoleh data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara, mengambil gambar, mencatat dan melihat dokumen.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif adalah teknik pengumpulan data untuk melengkapi metode observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data terkait penelitian dengan memperoleh dari arsip, dokumen, buku, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan.

F. Uji Keabsahan Data

Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang sangat berharga dalam sebuah penelitian. Data yang sudah terkumpul akan dilakukan analisis lanjutan guna sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan sehingga data yang didapatkan merupakan data yang valid dan realible. Imam Gunawan menyatakan bahwa terdapat empat kriteria yang bisa digunakan, yakni : kepercayaan (*credibility*), kebergantungan (*dependability*), keteralihan (*transferability*), dan kepastian (*comformability*).⁵⁰ Adapun untuk menetapkan keabsahan data maka diperlukan adanya alat dalam menganalisis data. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Triangulasi* sebagai alat untuk menganalisis data tersebut.

Treangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Jadi, terdapat tiga jenis *Triangulasi* yakni dari sumber/informasi, dari teknik pengumpulan data, dan waktu. *Triangulasi* yang digunakan penulis adalah *Triangulasi* sumber data maksudnya adalah cara yang digunakan dengan mencari data dari berbagai sumber yang beragam dan masih terkait satu sama

⁴⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Group*, hal. 131-132.

⁵⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. (Jakarta : PT Bumi Aksara 2016), hal 210.

lain.⁵¹ Dalam penelitian ini, *Triangulasi* sumber data yang dilakukan oleh peneliti ialah melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan dan mengecek kebenaran informasi yang telah diperoleh.

G. Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data merupakan tahap yang sangat penting, karena pada tahapan ini kaidah-kaidah yang mengatur keberadaan objek penelitian harus sudah diperoleh.⁵² Analisis data adalah proses pengorganisasian urutan data, pengorganisasian ke dalam satu pola, kategori, dan deskripsi untuk menemukan tema dan frase kerja yang disarankan oleh data. Analisis data bekerja dalam hal pengorganisasian, pengurutan, pengelompokan, pengkodean, dan pengklasifikasian data yang dikumpulkan dari catatan lapangan, gambar, foto, atau dokumen dalam format laporan. Kegiatan analisis data memiliki tiga fase untuk dilakukan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah kegiatan yang merangkum, memilih poin, berfokus pada apa yang penting, dan mencari tema dan pola. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data. Tahap reduksi dilakukan untuk mengkaji keseluruhan data yang dikumpulkan dari lapangan. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini antara lain:

- a. Data dan informasi dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dikumpulkan;
- b. Mencari poin-poin penting dari semua aspek temuan penelitian.⁵³

⁵¹Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2017)

⁵³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015) hal. 210.

2. Paparan Data

Teknik penyajian data dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Adapun fungsi data display untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis. Kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten. Ketika penulis kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulannya kredibel.⁵⁴ Pada tahap ini, kesimpulan yang ditarik dari data komparatif pada teori tertentu dievaluasi. Dimulai dengan survey pendahuluan (orientasi), wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian melakukan proses *member check* atau *recheck*. Selanjutnya, menarik kesimpulan secara umum yang dilaporkan sebagai hasil penelitian yang dilakukan.

⁵⁴ Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&H*. (Bandung: Alfabeta, 2013) hal. 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare sebagai objek penelitian dengan merujuk pada metode penelitian lapangan yang dilakukan, beberapa tahapan penelitian dilakukan diantaranya yaitu melakukan pengamatan atau observasi lapangan. Peneliti melakukan pengamatan dengan pengambilan data awal di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare. Tahapan selanjutnya yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan yang mewakili Pegawai Perusahaan yang terkait dengan fokus penelitian. Tahapan terakhir yaitu tahapan dokumentasi dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa referensi lainnya serta melakukan dokumentasi bukti autentik proses penelitian.

1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Di Perusahaan Air Minum Kota Parepare

Transparansi keuangan merupakan penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat luas (warga), dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan meningkatkan efektifitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan.

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber merujuk pada pedoman wawancara yang disusun untuk melihat bagaimana prinsip GCG dalam pengelolaan keuangan PAM tirta karaje kota parepare.

Peneliti bertanya terkait pertanyaan kesatu. Apakah setiap manajemen, Pegawai, dan pelanggan dapat mengakses laporan keuangan perusahaan?. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Iya betul dapat dapat mengakses laporan keuangan yang orang butuhkan jadi siapa yang membutuhkan itu apa-apa silahkan. Jadi kita tidak memberikan orang yang tidak butuhkan, nanti membutuhkan.”⁵⁵

Pernyataan Ibu Marwah Pawe, S.E. “Dalam mengakses laporan keuangan kita tidak membuka akses tersebut. karena itu privasi perusahaan jadi kita hanya memberikan jika dibutuhkan tapi tidak dapat diakses oleh semua orang.”⁵⁶

Pernyataan Ibu Wiwiek Hastya, S.M. “Kami tidak membuka akses untuk semua orang agar dapat melihat laporan keuangan perusahaan air minum tapi hanya yang terkait didalam bidang keuangan atau yang membutuhkan saja.”⁵⁷

Pernyataan Pak Muh. Arifin “Tidak dapat diakses untuk semua orang hanya pihak yang terkait dan yang membutuhkan jika tidak dibutuhkan otomatis tidak akan diberikan”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan kesatu pada prinsip Transparansi, jadi manajemen, pegawai, dan pelanggan dapat mengakses laporan keuangan perusahaan dengan meminta langsung dibagian keuangan PAM, mereka tidak membuka akses untuk semua orang dalam hal mengupload laporan keuangan di web, hanya yang membutuhkan laporan tersebut yang dapat memintanya secara langsung di PAM.

⁵⁵ Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

⁵⁶ Marwah Pawe, Assisten Manager Asset, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

⁵⁷ Wiwiek Hastya, Assisten Pembukuan & Akuntansi, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

⁵⁸ Muh. Arifin, Karyawan Bagian Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 19 Juni 2024

Peneliti bertanya terkait pertanyaan kedua yaitu, bagaimana proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional Bagian Keuangan dilakukan? Apakah secara terbuka dan obyektif, dengan tetap menjaga kerahasiaan pelanggan?

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Iya, Jadi pertama tetap kita menjaga kerahasiaan pelanggan yah, contoh pelanggan menunggak itu tetap kita menjaga kerahasiaan pelanggan dan ini kita terbuka. Terbukanya itu setiap tahun ini kita diaudit kita diperiksa oleh lembaga-lembaga yang sudah diatur oleh pemerintah.”⁵⁹

Pernyataan Ibu Marwah Pawe, S.E. “Iyah, hanya pihak terkait dengan tetap menjaga rahasia perusahaan dan privasi pelanggan”⁶⁰

Pernyataan Ibu Wiwiek Hastya, S.M. “Iyyaa, hanya pihak terkait dengan tetap menjaga rahasia perusahaan dan privasi pelanggan”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan kedua prinsip transparansi, proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional Bagian Keuangan dilakukan secara terbuka dan obyektif, dengan tetap menjaga kerahasiaan pelanggan. Contoh pelanggan menunggak mereka tetap menjaga kerahasiaan pelanggan tersebut dan terbukanya mereka setiap tahun diaudit, diperiksa oleh lembaga-lembaga yang sudah diatur oleh pemerintah.

Ketiga peneliti bertanya terkait Informasi tentang prosedur dan kebijakan di unit kerja telah dipublikasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak di dalam Bagian Keuangan?

⁵⁹ Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

⁶⁰ Marwah Pawe, Assisten Manager Asset, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

⁶¹ Wiwiek Hastya, Assisten Pembukuan & Akuntansi, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Iya. Khususnya divisi keuangan”⁶²

Pernyataan Ibu Marwah Pawe S.E. “iyaa, dalam hal prosedur dan kebijakan di unit kerja kami telah mempublikasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak yang ada di dalam Bagian Keuangan atau pihak yang terkait”⁶³

Pernyataan Ibu Wiwiek Hastya S.M “Jadi laporan Keuangan yaitu catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi, keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan ini.”⁶⁴

Pernyataan Pak Muh. Arifin “Iyya betul, Informasi tentang prosedur dan kebijakan di unit kerja telah dipublikasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak yang ada di dalam Bagian Keuangan”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan ketiga prinsip transparansi, prosedur dan kebijakan di unit kerja PAM telah dipublikasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak di dalam Bagian Keuangan.

Keempat peneliti bertanya terkait apakah bidang keuangan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat serta mudah diakses oleh pelanggan PAM?

⁶² Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

⁶³ Marwah Pawe, Assisten Manager Asset, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

⁶⁴ Wiwiek Hastya, Assisten Pembukuan & Akuntansi, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

⁶⁵ Muh. Arifin, Karyawan Bagian Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 19 Juni 2024

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Iya. Jadi kita buka, dari pelanggan akses pembayaran itu kita buka bahwa oh pelanggan ini oh bayarnya sekian kita buka”⁶⁶

Pernyataan Ibu Marwah Pawe, S.E. “iyya bidang keuangan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat serta mudah di akses oleh pelanggan PAM”⁶⁷

Pernyataan Ibu Wiwiek Hastya, S.M. “Iyah, Kami menyediakan informasi secara tepat waktu, serta mudah diakses oleh pelanggan PAM Tirta Karajae”⁶⁸

Pernyataan Pak Muh. Arifin “yah, bidang keuangan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat serta mudah diakses oleh pelanggan Perusahaan Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan keempat prinsip transparansi, bidang keuangan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat serta mudah diakses oleh pelanggan PAM khususnya terkait pembayaran.

Kelima peneliti bertanya terkait informasi apa saja yang dapat diakses oleh pelanggan PAM ?

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Tagihan pembayaran”

Pernyataan Ibu Marwah Pawe, S.E. “informasi yang dapat diakses secara bebas oleh pelanggan yaitu terkait tagihan pembayaran”

⁶⁶ Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

⁶⁷ Marwah Pawe, Assisten Manager Asset, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

⁶⁸ Wiwiek Hastya, Assisten Pembukuan & Akuntansi, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

⁶⁹ Muh. Arifin, Karyawan Bagian Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 19 Juni 2024

Pernyataan Ibu Wiwiek Hastya, S.M. “Tagihan Pembayaran atau mengenai info lainnya dapat dilihat melalui Website dan akun medsos”

Pernyataan Pak Muh. Arifin “informasi tentang tagihan pembayaran”

Berdasarkan dari hasil wawancara pertanyaan kelima prinsip transparansi, informasi yang dapat diakses oleh pelanggan PAM salah satunya yaitu tagihan pembayaran.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Perusahaan Air Minum Kota Parepare

Akuntabilitas merupakan hal terkait kejelasan fungsi, sistem, struktur, dan pertanggung jawaban orang-orang perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana dengan efektif. Berdasarkan prinsip ini, perlu untuk menetapkan detail tugas serta tanggung jawab dari masing-masing bagian di perusahaan dan semua karyawan secara jelas setara dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber merujuk pada pedoman wawancara yang disusun untuk melihat bagaimana prinsip GCG dalam pengelolaan keuangan PAM Tirta Karajae kota Parepare.

Peneliti bertanya terkait pertanyaan kesatu apakah bagian keuangan meyakini bahwa semua bagian perusahaan dan semua pegawai mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG?

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Iya. Jadi pegawai disini, penempatan pegawai itu sesuai dengan tupoksinya sesuai dengan bidangnya dan juga tidak menutup kemungkinan yah karena ini untuk membangun

pengetahuan terhadap anak-anak itu kadang kita melakukan rotasi, mutasi, tetapi sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kemampuan ilmunya.”⁷⁰

Pernyataan Ibu Marwah Pawe, S.E. “yah betul semua pegawai perusahaan khususnya di PAM Tirta Karajae Kota Parepare mempunyai kemampuan sesuai dengan tugasnya masing masing dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik”⁷¹

Pernyataan Ibu Wiwiek Hastya, S.M. “iya Bagian Keuangan meyakini bahwa semua bagian perusahaan dan semua Pegawai mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya”⁷²

Pernyataan Pak Muh. Arifin “Iya. Jadi penempatan pegawai itu sesuai dengan keahlian masing-masing dan sering juga terjadi pertukaran atau rotasi sesuai dengan kemauan pimpinan”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan kesatu prinsip akuntabilitas, bagian keuangan meyakini bahwa semua bagian perusahaan dan semua pegawai mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. Pegawai ditempatkan sesuai tupoksinya, mereka juga melakukan rotasi, mutasi, sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kemampuan ilmunya.

Kedua peneliti bertanya terkait Bagaimana bidang keuangan memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan keuangan?

⁷⁰ Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

⁷¹ Marwah Pawe, Assisten Manager Asset, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

⁷² Wiwiek Hastya, Assisten Pembukuan & Akuntansi, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

⁷³ Muh. Arifin, Karyawan Bagian Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 19 Juni 2024

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Sistem pengendalian itu ada SOP, ada prosedur-prosedur yang kita lakukan itu, jadi ada proses. Jadi semuanya contoh: ada kita mau pergi itu melalui proses dulu, tidak langsung. Kita beli ke pasar melalui prosesnya dulu jadi ada istilahnya DPB (*Daftar permintaan barang*) daftar permintaan barang itu yah siapa yang membutuhkan, bidang divisi apa yang membutuhkan itu di usulkan, begitu diusulkan diproses jadi tidak langsung”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan kedua prinsip akuntabilitas, bidang keuangan memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan keuangan

Ketiga peneliti bertanya terkait Apakah bagian keuangan memiliki ukuran kinerja untuk semua Pegawai yang konsisten dengan nilai-nilai Bagian Keuangan, sasaran utama, strategi serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi?

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Iya. Jadi bagian keuangan ini, bukan cuman bagian keuangan, bagian SDM itu melakukan evaluasi yah, terhadap capaian-capaian yang telah kita capai makanya setiap bulan kita mereview laporan ini, dimana kira-kira kekurangannya, apanya perlu kita genjot yang perlu kita pertahankan dimana untuk periode selanjutnya”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan ketiga prinsip akuntabilitas, bagian keuangan memiliki ukuran kinerja untuk semua pegawai yang konsisten dengan nilai-nilai Bagian Keuangan, sasaran utama, strategi serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi. Jadi bukan hanya bagian keuangan juga bagian SDM melakukan evaluasi terhadap capaian-capaian yang telah di

⁷⁴ Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

⁷⁵ Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

capai dan mereview laporan dimana letak kekurangannya untuk di pertahankan pada periode selanjutnya.

Keempat peneliti bertanya terkait Apakah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya setiap Pegawai harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati?

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Iya. Sesuai dengan SOP, jadi ada sop-nya jadi apa yang sudah kita sepakati bersama itu yang kita jalankan.”⁷⁶

Pernyataan Ibu Marwah Pawe, S.E. “iyya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya setiap Pegawai harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati”⁷⁷

Pernyataan Ibu Wiwiek Hastya, S.M. “iyah, setiap pegawai harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah perusahaan sepakati”⁷⁸

Pernyataan Pak Muh. Arifin “iyaa, setiap Pegawai harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati Sesuai dengan peraturan yang ada dan yang telah kita sepakati bersama di PAM”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan keempat prinsip akuntabilitas, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya setiap Pegawai harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati, sesuai dengan SOP yang telah mereka sepakati.

⁷⁶ Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

⁷⁷ Marwah Pawe, Assisten Manager Asset, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

⁷⁸ Wiwiek Hastya, Assisten Pembukuan & Akuntansi, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

⁷⁹ Muh. Arifin, Karyawan Bagian Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 19 Juni 2024

Kelima peneliti bertanya terkait Apakah sistem penilaian kinerja operasional, organisasi, dan kinerja perseorangan telah sepakat ditetapkan, diterapkan dan dievaluasi dengan baik?

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Iya. Ada SPI (satuan pengawas internal) jadi setiap pekerjaan-pekerjaan, khususnya pekerjaan yang ada dilapangan, pekerjaan yang ada di administrasi direview oleh SPI (satuan pengawas internal) itu yang melakukan. Tetapi, SPI ini melakukan tadi, itu tadi sudah ada prosedur dibawahnya aturan itu tadi”⁸⁰

Pernyataan Ibu Marwah Pawe, S.E. “iyah, Sistem penilaian kinerja operasional, organisasi, dan kinerja perseorangan telah sepakat ditetapkan, diterapkan dan dievaluasi dengan baik melalui audit kinerja”⁸¹

Pernyataan Ibu Wiwiek Hastya, S.M. “Yah telah sepakat ditetapkan, diterapkan dan dievaluasi dengan baik melalui audit kinerja”⁸²

Pernyataan Pak Muh. Arifin “iyya, telah sepakat ditetapkan, diterapkan dan dievaluasi dengan baik”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan kelima prinsip akuntabilitas, sistem penilaian kinerja operasional, organisasi, dan kinerja perseorangan telah sepakat ditetapkan, diterapkan dan dievaluasi dengan baik jadi setiap pekerjaan-pekerjaan, khususnya pekerjaan yang ada dilapangan, pekerjaan yang ada di administrasi direview oleh SPI (satuan pengawas internal) tersebut.

⁸⁰ Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

⁸¹ Marwah Pawe, Assisten Manager Asset, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

⁸² Wiwiek Hastya, Assisten Pembukuan & Akuntansi, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

⁸³ Muh. Arifin, Karyawan Bagian Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 19 Juni 2024

Keenam peneliti bertanya terkait Apakah hasil pekerjaan telah didokumentasikan, dipelihara, dan dijaga dengan baik?

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Iya. Jadi semua pekerjaan yang kita sudah selesai, jadi mulai dari nol kita melakukan dokumentasi sampai dengan proses, proses pekerjaan sampai dengan proses jadi. Selesai itu pekerjaan jadi mulai dari foto awal sampai dengan foto akhir. Inilah foto awal sampai akhir inilah yang melakukan pertanggungjawaban untuk transaksi, sesuai dengan kebutuhan yang ada”⁸⁴

Pernyataan Ibu Marwah Pawe, S.E. “iyah, hasil pekerjaan telah didokumentasikan, dipelihara, dan dijaga dengan baik itu dibuat dalam bentuk laporan tahunan”⁸⁵

Pernyataan Ibu Wiwiek Hastya, S.M. “iyya, dibuat dalam bentuk laporan tahunan”⁸⁶

Pernyataan Pak Muh. Arifin “yaa, jadi hasil pekerjaan telah didokumentasikan, dipelihara, dan dijaga dengan baik”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan keenam prinsip akuntabilitas, hasil pekerjaan telah didokumentasikan, dipelihara, dan dijaga dengan baik jadi mulai dari nol mereka melakukan dokumentasi sampai dengan tahap proses, samai pada tahap jadi, sampai akhir inilah

⁸⁴ Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

⁸⁵ Marwah Pawe, Assisten Manager Asset, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

⁸⁶ Wiwiek Hastya, Assisten Pembukuan & Akuntansi, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

⁸⁷ Muh. Arifin, Karyawan Bagian Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 19 Juni 2024

yang mereka lakukan pertanggungjawaban untuk transaksi, sesuai dengan kebutuhan yang ada.

3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Di Perusahaan Air Minum Kota Parepare

Prinsip dasar pertanggung Jawaban (*Responsibility*) menjelaskan bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber merujuk pada pedoman wawancara yang disusun untuk melihat bagaimana prinsip GCG dalam pengelolaan keuangan PAM tirta karaje kota parepare.

Peneliti bertanya terkait pertanyaan kesatu Apakah manajer dan Pegawai Bagian Keuangan telah bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku di Bagian Keuangan?

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Yah, jadi bagian keuangan ini ketika proses-proses itu sudah selesai dikerjakan maka masuklah dibagian keuangan nah, bagian keuangan ini tentunya melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang ada, itu baru diproses”⁸⁸

Pernyataan Ibu Marwah Pawe, S.E. “Iya jadi Manager dan Pegawai Bagian Keuangan telah bekerja sudah sesuai dengan SOP/ketentuan yang telah berlaku”⁸⁹

⁸⁸ Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

⁸⁹ Marwah Pawe, Assisten Manager Asset, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

Pernyataan Ibu Wiwiek Hastya, S.M. “Ya Manajer dan Pegawai Bagian Keuangan telah bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku di bagian keuangan in”⁹⁰

Pernyataan Pak Muh. Arifin “Iya. Jdi pegawai bagian keuangan telah melakukan proses dimana bagian keuangan tentunya telah melakukan verifikasi terhadap dokumen yang ada”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan kesatu Prinsip pertanggungjawaban, manajer dan Pegawai Bagian Keuangan telah bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku di Bagian Keuangan, ketika proses-proses itu sudah selesai dikerjakan maka masuklah dibagian keuangan, bagian keuangan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang ada, kemudian diproses.

Kedua peneliti bertanya terkait Bagaimana upaya Bagian Keuangan menghindari kerugian yang terjadi?

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Jadi, bagian keuangan menghindari kerugian yang terjadi itu ketika ada laporan. Membuat satu laporan bahwa oh ini perlu kita lakukan efisiensi karena dia itu berdasarkan dengan RKA yang ada (*rencana keperluan anggaran*) jadi sebelum kita berinteraksi dengan transaksi yang ada, itu tadi memang sudah ada estimasi, sudah ada anggaran yang ditetapkan. Contoh ini tahun kita punya program bekerja oh ini, oh begini jadi begitu yaa”⁹²

Pernyataan Pak Muh. Arifin “Jadi bagian keuangan tentunya sudah paham dengan resiko yang akan terjadi jadi untuk menghindari kerugian yang

⁹⁰ Wiwiek Hastya, Assisten Pembukuan & Akuntansi, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

⁹¹ Muh. Arifin, Karyawan Bagian Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 19 Juni 2024

⁹² Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

terjadi pegawai keuangan membuat laporan bahwa ini yang perlu kita lakukan efisiensi berdasarkan apa yang terjadi”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan kedua Prinsip pertanggungjawaban, upaya Bagian Keuangan menghindari kerugian yang terjadi dengan membuat satu laporan bahwa ini yang perlu dilakukan efisiensi karena dia itu berdasarkan dengan RKA yang ada (*rencana keperluan anggaran*) jadi sebelum mereka berinteraksi dengan transaksi yang ada, itu sudah ada estimasi, sudah ada anggaran yang ditetapkan.

Ketiga peneliti bertanya terkait Apakah proses pendelegasian kewenangan telah dijalankan dengan cukup dan baik demi terselenggaranya pekerjaan?

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Iya. Jadi pendelegasian kewenangan itu yaa. Itu tadi seumpamanya contoh: ketika Si A berhalangan apa dan sebagainya ini tadi didelegasikan kebawa. Didelegasikan kebawa itu ada penunjukan surat tugas”⁹⁴

Pernyataan Ibu Marwah Pawe, S.E. “iyah, proses pendelegasian kewenangan juga telah dijalankan dengan cukup dan baik demi terselenggaranya suatu pekerjaan”⁹⁵

Pernyataan Ibu Wiwiek Hastya, S.M. “iyya, dalam proses pendelegasian kewenangan telah dijalankan dengan cukup dan baik”⁹⁶

⁹³ Muh. Arifin, Karyawan Bagian Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 19 Juni 2024

⁹⁴ Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

⁹⁵ Marwah Pawe, Assisten Manager Asset, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

⁹⁶ Wiwiek Hastya, Assisten Pembukuan & Akuntansi, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

Pernyataan Pak Muh. Arifin “yah. telah dijalankan dengan cukup baik demi terselenggaranya pekerjaan”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan ketiga Prinsip pertanggungjawaban, proses pendelegasian kewenangan telah dijalankan dengan cukup dan baik demi terselenggaranya pekerjaan. contoh: ketika Si A berhalangan apa dan sebagainya ini kemudian didelegasikan kebawah, didelegasikan kebawah itu ada penunjukan surat tugas.

Keempat peneliti bertanya terkait Apakah kepala bidang dan Pegawai melakukan pertanggungjawaban hasil kerja secara teratur?

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Iya. Jadi itu secara continue, secara teratur kita lakukan”⁹⁸

Pernyataan Ibu Marwah Pawe, S.E. “Iyaa, kepala bidang dan Pegawai melakukan tanggungjawab dari hasil kerja teratur yaitu laporan bulanan”⁹⁹

Pernyataan Ibu Wiwiek Hastya, S.M. “iyaa, Bentuk tanggung jawab yang dilakukan pegawai dari hasil kerja teratur adalah laporan bulanan”¹⁰⁰

Pernyataan Pak Muh. Arifin “yah saya rasa sudah dijalankan dengan baik”¹⁰¹

⁹⁷ Muh. Arifin, Karyawan Bagian Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 19 Juni 2024

⁹⁸ Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

⁹⁹ Marwah Pawe, Assisten Manager Asset, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

¹⁰⁰ Wiwiek Hastya, Assisten Pembukuan & Akuntansi, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

¹⁰¹ Muh. Arifin, Karyawan Bagian Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 19 Juni 2024

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan keempat Prinsip pertanggungjawaban, kepala bidang dan Pegawai melakukan pertanggungjawaban hasil kerja secara teratur dan melakukan tanggungjawab dari hasil kerja teratur yaitu laporan bulanan.

4. Kemandirian Pengelolaan Keuangan Di Perusahaan Air Minum Kota Parepare

Prinsip dasar kemandirian adalah keadaan perusahaan yang dikelola dengan profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus dikelola secara independent sehingga setiap bidang dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber merujuk pada pedoman wawancara yang disusun untuk melihat bagaimana prinsip GCG dalam pengelolaan keuangan PAM tirta karaje kota parepare.

Peneliti bertanya terkait pertanyaan kesatu Saat mengelolah keuangan, Pegawai menghindari terjadinya didominasi oleh pihak manapun?

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Iya. Jadi itu tadi saya katakan bahwa di pekerjaan yang satu itu tentunya kita tidak asal menempatkan orang itu tadi jadi, ada prinsip the right man on the right place (penempatan seseorang sesuai dengan bidangnya) nah, jadi kita menempatkan orang sesuai dengan bidangnya karena kenapa, ini ada target yang kita mau capai. Apa gunanya kita menempatkan seseorang ini tetapi bukan tupoksinya, tentunya kalau bukan tupoksinya artinya kita mau capai kedepan ini sesuai dengan itu tadi, ada kaitannya dengan GCG itu yakin dan percaya tidak akan tercapai”¹⁰²

¹⁰² Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

Pernyataan Ibu Marwah Pawe, S.E. “Iya. tentu saja saat mengelolah keuangan, pegawai menghindari terjadinya didominasi oleh pihak manapun karena para pegawai memiliki posisi atau tempat masing-masing yang telah di berikan oleh pimpinan”¹⁰³

Pernyataan Ibu Wiwiek Hastya, S.M. “Iyah. Jadi pimpinan pun tidak asal menempatkan pegawai, kami ditempatkan pada bidang kami masing-masing jadi, pegawai di bagian keuangan pastinya menghindari hal yang seperti itu agar data-data yang di dapatkan tidak di ganggu oleh pihak manapun”¹⁰⁴

Pernyataan Pak Muh. Arifin “yah, saat mengelolah keuangan, Pegawai menghindari terjadinya didominasi oleh pihak manapun karena kami ditempatkan sesuai dengan bidangnya, agar menghindari kesalahan yang terjadi”¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan kesatu Prinsip kemandirian, Saat mengelolah keuangan, Pegawai menghindari terjadinya didominasi oleh pihak manapun Jadi direktur mengatakan bahwa di pekerjaan yang satu itu tentunya perusahaan tidak asal menempatkan karyawan, ada prinsip the right man on the right place (penempatan seseorang sesuai dengan bidangnya) nah, jadi perusahaan menempatkan orang sesuai dengan bidangnya karena kenapa, ini ada target yang ingin di capai. Apa gunanya menempatkan seseorang ini tetapi bukan tupoksinya, tentunya kalau bukan tupoksinya artinya perusahaan

¹⁰³ Marwah Pawe, Assisten Manager Asset, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

¹⁰⁴ Wiwiek Hastya, Assisten Pembukuan & Akuntansi, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

¹⁰⁵ Muh. Arifin, Karyawan Bagian Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 19 Juni 2024

mau capai kedepan ini sesuai dengan, ada kaitannya dengan GCG itu yakin dan percaya tidak akan tercapai.

Kedua peneliti bertanya terkait Bagaimana cara pegawai agar tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif?

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Iyaa. Jadi pegawai itu memang sudah dibekali, disiplin dalam hal bekerja, begitu kemudian ada rambu-rambu yang kita tanamkan ke pegawai bahwa kita tidak boleh memungut apapun di masyarakat itu dalam hal pelayanan, jangan yah. Jadi ketika kita seumpamanya melakukan pekerjaan bocoran apa dan sebagainya itu tidak bisa dibayar dan apa sebagainya yah ada kode etik”¹⁰⁶

Pernyataan Ibu Marwah Pawe, S.E. “iyah, cara pegawai agar tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif para pegawai tentunya telah mengetahui bahwa jam kerja yaa kerja diluar jam kerja bebas”¹⁰⁷

Pernyataan Ibu Wiwiek Hastya, S.M. “iyaa, agar tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif yaa tentunya para pegawai tahu kalau pada saat jam kerja

¹⁰⁶ Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

¹⁰⁷ Marwah Pawe, Assisten Manager Asset, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

tidak ada yang boleh meninggalkan pekerjaannya sesuai dengan peraturan yang ada, kecuali dalam keadaan penting dan harus izin kepada pimpinan”¹⁰⁸

Pernyataan Pak Muh. Arifin “Pegawai telah memiliki modal dalam bidang keahliannya dan disiplin dalam bekerja kemudian pegawai harus melaksanakan apa yang telah di tugaskan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya”¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan kedua Prinsip kemandirian, cara pegawai agar tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif mereka sudah dibekali, disiplin dalam hal bekerja kemudian pegawai harus melaksanakan apa yang telah di tugaskan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya.

Ketiga peneliti bertanya terkait Apakah Pegawai harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan, dan tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif?

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Iya. Jadi pekerjaan ini orang tidak boleh melempar tanggungjawab, jadi tanggungjawab si A dilempar sini tidak boleh, jadi masing-masing bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya masing-masing”¹¹⁰

Pernyataan Ibu Marwah Pawe, S.E. “yah, pegawai juga melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan, tidak saling mendominasi dan

¹⁰⁸ Wiwiek Hastya, Assisten Pembukuan & Akuntansi, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

¹⁰⁹ Muh. Arifin, Karyawan Bagian Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 19 Juni 2024

¹¹⁰ Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif”¹¹¹

Pernyataan Ibu Wiwiek Hastya, S.M. “iyya, semua pegawai yang bekerja disini harus bertanggung jawab atas pekerjaannya dan tidak boleh memberikan pertanggungjawaban kepada pihak manapun”¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan ketiga Prinsip kemandirian, Pegawai harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan, dan tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif, masing-masing bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Keempat peneliti bertanya terkait Apakah Keputusan pimpinan hendaknya lepas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan Bagian Keuangan?

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Iya. Jadi keputusan pimpinan disini, itu tidak di interpeksi oleh pihak-pihak diluar, Jadi keputusan pimpinan ini berdasarkan dengan SOP yang dari bawah”¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan keempat Prinsip kemandirian, Keputusan pimpinan hendaknya lepas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan Bagian Keuangan Jadi keputusan pimpinan di PAM, itu tidak di interpeksi oleh pihak-pihak diluar, Jadi keputusan pimpinan ini berdasarkan dengan SOP dari bawah.

¹¹¹ Marwah Pawe, Assisten Manager Asset, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

¹¹² Wiwiek Hastya, Assisten Pembukuan & Akuntansi, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

¹¹³ Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

Kelima peneliti bertanya terkait Apakah proses pengambilan keputusan di Bagian Keuangan telah dilakukan secara obyektif untuk kepentingan Bagian Keuangan?

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Iya. Jadi pimpinan itu melakukan keputusan secara obyektif sesuai dengan data-data yang ada terkumpul, kemudian membuatlah satu kesimpulan, satu keputusan bahwa langkah kedepan kita harus lakukan adalah ini”

Pernyataan Ibu Marwah Pawe, S.E. “Iyaa, proses pengambilan keputusan di bagian keuangan, tentu saja data-data yang diperoleh oleh pegawai keuangan tentunya telah jadi keputusan yang harus diketahui oleh pimpinan”¹¹⁴

Pernyataan Ibu Wiwiek Hastya, S.E. “Yah, pengambilan keputusan di bagian keuangan telah dilakukan secara baik dalam kepentingan bersama para pegawai keuangan dan diketahui oleh pimpinan”¹¹⁵

Peryataan Pak Muh. Arifin “iyaa, Pimpinan melakukan keputusan secara obyektif sesuai dengan laporan laporan yang ada”¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan kelima Prinsip kemandirian, proses pengambilan keputusan di Bagian Keuangan telah dilakukan secara obyektif untuk kepentingan Bagian Keuangan. Jadi pimpinan melakukan keputusan secara obyektif sesuai dengan data-data yang terkumpul, kemudian

¹¹⁴ Marwah Pawe, Assisten Manager Asset, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

¹¹⁵ Wiwiek Hastya, Assisten Pembukuan & Akuntansi, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

¹¹⁶ Muh. Arifin, Karyawan Bagian Keuangan, Wawanara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 19 Juni 2024

membuatlah satu kesimpulan, satu keputusan bahwa langkah kedepan mereka harus lakukan adalah ini.

5. Kewajaran Pengelolaan Keuangan Di Perusahaan Air Minum Kota Parepare

Kewajaran dapat juga disebut dengan kesetaraan, dimana ini merujuk pada perlakuan yang adil dan setara. Setara dalam memenuhi hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber merujuk pada pedoman wawancara yang disusun untuk melihat bagaimana prinsip GCG dalam pengelolaan keuangan PAM tirta karaje kota parepare.

Peneliti bertanya terkait pertanyaan kesatu Dalam pengelolaan keuangan apakah direktur maupun Pegawai dapat memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan mereka pada pembuatan laporan keuangan?

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Iya. Jadi pada saat laporan keuangan kita mau sajikan, itu tadi telah disajikan ini kan kita melakukan rapat bahwa posisi laporan keuangan kita ini adalah oh ini, posisi begini”¹¹⁷

Pernyataan Ibu Marwah Pawe, S.E. “Iyaa. dalam pengelolaan keuangan direktur maupun pegawai dapat memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bersama pada pembuatan laporan keuangan”¹¹⁸

Pernyataan Ibu Wiwiek Hastya, S.M. “iyya, dalam pengelolaan keuangan direktur maupun pegawai dapat memberikan masukan dan

¹¹⁷ Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

¹¹⁸ Marwah Pawe, Assisten Manager Asset, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

menyampaikan pendapat bagi kepentingan bersama dalam pembuatan laporan keuangan”¹¹⁹

Pernyataan Pak Muh. Arifin “Iya. Jadi direktur maupun pegawai dapat memberikan masukan dan menyampaikan pendapatnya dalam pembuatan laporan keuangan”¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan kesatu Prinsip kewajaran, Dalam pengelolaan keuangan apakah direktur maupun Pegawai dapat memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan mereka pada pembuatan laporan keuangan. Pada saat laporan keuangan mereka sajikan, kemudian mereka melakukan rapat bahwa posisi laporan keuangan begini dan oh ini begini kemudian posisinya begini.

Kedua peneliti bertanya terkait Apakah direktur (kepala bidang) memberikan perlakuan yang setara dan wajar sesuai dengan kontribusi yang dilakukan oleh Pegawai?

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Iya. Jadi pegawai itu ketika memberikan saran dan masukan sama dengan saran masukan dalam hal saran perbaikan terhadap perusahaan. Yaa itu kita terima, seperti kondisi dilapangan begini, kasusnya begini atau tidak begini itu kita terima”¹²¹

¹¹⁹ Wiwiek Hastya, Assisten Pembukuan & Akuntansi, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

¹²⁰ Muh. Arifin, Karyawan Bagian Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 19 Juni 2024

¹²¹ Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

Pernyataan Ibu Marwah Pawe, S.E. “Direktur memberikan perlakuan yang setara dan wajar sesuai dengan kontribusi yang dilakukan oleh pegawai”¹²²

Pernyataan Ibu Wiwiek Hastya, S.M. “yah, Direktur (kepala bidang) memberikan perlakuan yang setara dan wajar sesuai dengan kontribusi yang dilakukan oleh pegawai”¹²³

Pernyataan Pak Muh. Arifin “iyaa, direktur memberikan perlakuan yang setara dan wajar sesuai dengan kontribusi yang dilakukan oleh pegawai”¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan kedua Prinsip kewajaran, direktur (kepala bidang) memberikan perlakuan yang setara dan wajar sesuai dengan kontribusi yang dilakukan oleh Pegawai Jadi pegawai PAM ketika memberikan saran dan masukan sama dengan saran masukan dalam hal saran perbaikan terhadap perusahaan. Yah itu mereka terima, seperti kondisi dilapangan begini, kasusnya begini atau tidak begini itu mereka terima.

Ketiga peneliti bertanya terkait Bagaimana direktur (kepala bidang) memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder secara wajar menurut ketentuan yang berlaku umum?

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Jadi PAM ini memberikan perhatian kepada stakeholder yah, dari hal tingkat kepercayaan yah, itu bahwa program-program yang kita lakukan di PAM itu diantaranya adalah ini, ada

¹²² Marwah Pawe, Assisten Manager Asset, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

¹²³ Wiwiek Hastya, Assisten Pembukuan & Akuntansi, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

¹²⁴ Muh. Arifin, Karyawan Bagian Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 19 Juni 2024

macam-macam. Supaya untuk membangun tingkat kepercayaan kepada masyarakat”¹²⁵

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan ketiga Prinsip kewajaran, direktur (kepala bidang) memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder secara wajar menurut ketentuan yang berlaku umum. Jadi PAM ini memberikan perhatian kepada stakeholder, dari hal tingkat kepercayaan, bahwa program-program yang mereka lakukan di PAM itu diantaranya adalah ini, ada macam-macam. Supaya untuk membangun tingkat kepercayaan kepada masyarakat.

Keempat peneliti bertanya terkait Dalam proses pengelolaan keuangan, Pegawai diberikan kesempatan yang sama dalam melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik?

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Iya. Jadi ini dalam hal kinerja kepada karyawan ya' kaitannya dengan itu. Jadi, perusahaan itu senantiasa memperhatikan dan menilai bahwa karyawan ini, nilai attitudenya bagus yaa tetap kita perhatikan itu”

Pernyataan Ibu Marwah Hastya, S.E. “yah, dalam proses pengelolaan keuangan, Pegawai diberikan kesempatan yang sama dalam melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik”¹²⁶

¹²⁵ Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

¹²⁶ Marwah Pawe, Assisten Manager Asset, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

Pernyataan Ibu Wiwiek Hastya, S.M. “iyaa, secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik”¹²⁷

Pernyataan Pak Muh. Arifin “iyaa, Perusahaan ini memperhatikan dan menilai bahwa karyawan ini memiliki kepribadian yang baik”¹²⁸

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan keempat Prinsip kewajaran, Dalam proses pengelolaan keuangan, Pegawai diberikan kesempatan yang sama dalam melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik.

Kelima peneliti bertanya terkait Apakah Perlakuan adil kepada seluruh pihak pemegang kepentingan (pelanggan, pemilik) dalam memberikan pelayanan dan informasi sudah dilakukan?

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “iya sudah dilakukan dengan baik”¹²⁹

Pernyataan Ibu Marwah Pawe, S.E. “Perlakuan adil kepada seluruh pihak pemegang kepentingan dalam memberikan pelayanan dan informasi sudah dilakukan dengan baik”

Pernyataan Ibu Wiwiek Hastya, S.M. “iyaa, sudah dilakukan dengan baik”

Pernyataan Pak Arifin “yah, dalam memberikan pelayanan dan informasi tentu saja sudah dilakukan dengan baik”

¹²⁷ Wiwiek Hastya, Assisten Pembukuan & Akuntansi, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 14 Juni 2024

¹²⁸ Muh. Arifin, Karyawan Bagian Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 19 Juni 2024

¹²⁹ Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan kelima Prinsip kewajaran, Perlakuan adil kepada seluruh pihak pemegang kepentingan (pelanggan, pemilik) dalam memberikan pelayanan dan informasi sudah dilakukan dengan baik.

Keenam peneliti bertanya terkait Apakah perlakuan, pengembangan timwork, hubungan kerja dan pembinaan pada Pegawai bagian keuangan akan dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajibannya secara adil dan wajar?

Pernyataan Pak Rahman Ngara, S.E. “Iya. Jadi, pegawai itu kita perlakukan adil dan wajar, adil dan wajar ini kita tidak ada membedakan antara si A dan si B antara golongan. Golongan ini kita samakan”¹³⁰

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan keenam Prinsip kewajaran, perlakuan, pengembangan timwork, hubungan kerja dan pembinaan pada Pegawai bagian keuangan akan dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajibannya secara adil dan wajar tidak membedakan antara si A dan si B antara golongan. Golongan ini mereka samakan.

Kemudian Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pelanggan PAM Tirta Karajae Kota Parepare merujuk pada pedoman wawancara yang disusun untuk melihat bagaimana prinsip GCG dalam pengelolaan keuangan PAM tirta karaje kota parepare.

Peneliti bertanya Kepada pelanggan terkait pertanyaan kesatu yaitu, Informasi apa saja yang dapat dilihat/diakses oleh Ibu?. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

¹³⁰ Rahman Ngara, PLH Direktur & PLT Manager Keuangan, Wawancara Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare, 10 Juni 2024

Pernyataan kepada Informan pertama Habibah “Informasi terkait pembayaran air di PAM dan berita seputar PAM”¹³¹

Pernyataan kepada Informan kedua Hernan “Informasi gangguan pembersihan pompa dan pipa hisap sumur”¹³²

Pernyataan kepada Informan ketiga Suharsih, S.Pd. “Jumlah Tagihan Pembayaran”¹³³

Berdasarkan hasil wawancara Pelanggan pada pertanyaan kesatu, Informasi yang dapat dilihat/diakses oleh Pak dan Ibu yaitu informasi terkait pembayaran/ jumlah tagihan pembayaran, dan informasi terkait gangguan pembersihan pompa dan pipa hisap sumur.

Peneliti bertanya Kepada pelanggan terkait pertanyaan kedua yaitu, Dimana Ibu dapat mengakses informasi terkait PAM?. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

Pernyataan kepada Informan pertama Habibah “Di aplikasi flif yaitu aplikasi keuangan untuk transfer dan pembayaran digital”¹³⁴

Pernyataan kepada Informan kedua Hernan “Story whatsapp teman yang bekerja di PAM”¹³⁵

Pernyataan kepada Informan ketiga Suharsih, S.Pd. “Kalau cuma terkait pembayaran yah di aplikasi mobile banking juga bisa”¹³⁶

¹³¹ Habibah, Pelanggan PAM Tirta Karajae, Jln. Laupe (Lorong Poltekes KM. 5) Kota Parepare, 19 Juni 2024

¹³² Hernan, Pelanggan PAM Tirta Karajae, Jln. Kesuma Timur Kota Parepare, 19 Juni 2024

¹³³ Suharsih, Pelanggan PAM Tirta Karajae, Bilalang'E Kota Parepare, 19 Juni 2024

¹³⁴ Habibah, Pelanggan PAM Tirta Karajae, Jln. Laupe Kota (Lorong Poltekes KM. 5) Parepare, 19 Juni 2024

¹³⁵ Hernan, Pelanggan PAM Tirta Karajae, Jln. Kesuma Timur Kota Parepare, 19 Juni 2024

¹³⁶ Suharsih, Pelanggan PAM Tirta Karajae, Bilalang'E Kota Parepare, 19 Juni 2024

Berdasarkan hasil wawancara Pelanggan pada pertanyaan kedua, dimana Pak/Ibu dapat mengakses informasi terkait PAM yaitu di aplikasi flif, di story whatsapp kerabat, dan di mobile banking juga bisa.

Peneliti bertanya Kepada pelanggan terkait pertanyaan ketiga yaitu, Apakah informasi tersebut sudah cukup?. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

Pernyataan kepada Informan kesatu Habibah “Menurut saya cukup karna informasi tersebut dapat membantu saya dan memudahkan saya untuk melakukan pembayaran secara online”¹³⁷

Pernyataan kepada Informan kedua Hernan “Sangat cukup”¹³⁸

Pernyataan kepada Informan ketiga Suharsih, S.Pd. “Menurut saya itu sudah cukup karena hanya itu yang penting menurut saya, yang penting tidak menunggak pembayaran”¹³⁹

Berdasarkan hasil wawancara Pelanggan pada pertanyaan ketiga, Apakah informasi tersebut sudah cukup? Menurut mereka sudah cukup karna informasi tersebut dapat membantu dan memudahkannya untuk melakukan pembayaran secara online

Peneliti bertanya Kepada pelanggan terkait pertanyaan keempat yaitu, Bagaimana cara PAM menyediakan informasi? Apakah tepat waktu atau tidak?. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

Pernyataan kepada Informan pertama Habibah “PAM menyediakan informasi dengan sangat baik, contohnya ketika ingin membayar air pastinya kita dapat instruksi dan notifikasi tentang pembayaran”¹⁴⁰

¹³⁷ Habibah, Pelanggan PAM Tirta Karajae, Jln. Laupe (Lorong Poltekes KM. 5) Kota Parepare, 19 Juni 2024

¹³⁸ Hernan, Pelanggan PAM Tirta Karajae, Jln. Kesuma Timur Kota Parepare, 19 Juni 2024

¹³⁹ Suharsih, Pelanggan PAM Tirta Karajae, Bilalang'E Kota Parepare, 19 Juni 2024

Pernyataan kepada Informan kedua Hernan “Saya rasa tepat waktu, 1 atau 2 hari sebelum gangguan”¹⁴¹

Pernyataan kepada Informan ketiga Suharsih, S.Pd. “Menurut saya PAM menyediakan informasi termasuk bagus karena PAM juga bekerja sama dengan radio mesra dan di radio mesra itu selalu disiarkan terkait PAM”¹⁴²

Berdasarkan hasil wawancara Pelanggan pada pertanyaan keempat, menurut mereka PAM menyediakan informasi dengan sangat baik, contohnya ketika ingin membayar air pastinya kita dapat instruksi dan notifikasi tentang pembayaran.

Peneliti bertanya Kepada pelanggan terkait pertanyaan kelima yaitu, Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh perusahaan air minum? Apakah pelayanan yang diberikan memperhatikan etika dan moral?. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

Pernyataan kepada Informan pertama Habibah “Menurut saya pelayanan PAM cukup baik dalam pelayanan dan bertanggung jawab. Ketika ada kostumer yang bermasalah airnya pasti direspon dengan cepat”¹⁴³

Pernyataan kepada Informan kedua Hernan “Dari pelayanan PAM sangat baik dan bertanggung jawab dalam pekerjaan”¹⁴⁴

Pernyataan kepada Informan ketiga Suharsih, S.Pd. “Pelayanannya, Alhamdulillah menurut saya cukup memuaskan untuk pelayanannya bagus beretika dan bermoral dalam memeriksa yah”¹⁴⁵

¹⁴⁰ Habibah, Pelanggan PAM Tirta Karajae, Jln. Laupe (Lorong Poltekes KM. 5) Kota Parepare, 19 Juni 2024

¹⁴¹ Hernan, Pelanggan PAM Tirta Karajae, Jln. Kesuma Timur Kota Parepare, 19 Juni 2024

¹⁴² Suharsih, Pelanggan PAM Tirta Karajae, Bilalang'E Kota Parepare, 19 Juni 2024

¹⁴³ Habibah, Pelanggan PAM Tirta Karajae, Jln. Laupe (Lorong Poltekes KM. 5) Kota Parepare, 19 Juni 2024

¹⁴⁴ Hernan, Pelanggan PAM Tirta Karajae, Jln. Kesuma Timur Kota Parepare, 19 Juni 2024

Berdasarkan hasil wawancara Pelanggan pada pertanyaan kelima, Menurut mereka pelayanan PAM cukup baik dalam pelayanan dan bertanggung jawab. Ketika ada kostumer yang bermasalah airnya pasti direspon dengan cepat, dari pelayanan PAM sangat baik dan bertanggung jawab dalam pekerjaan dan pelayanannya baik beretika dan bermoral dalam memeriksa.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan seluruh penjelasan hasil penelitian di atas terdapat beberapa pembahasan penelitian yang merujuk pada fokus penelitian ini, yaitu:

Pengelolaan keuangan adalah aktivitas keuangan yang berkaitan dengan perencanaan, pencatatan, pengendalian, dan pelaporan keuangan yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup suatu bisnis yang dijalankannya. Adapun fungsi pengelolaan keuangan untuk melakukan perencanaan keuangan berkaitan dengan perencanaan aliran kas dan laba perusahaan; untuk mengalokasikan biaya usahanya secara tepat; sebagai bahan evaluasi keuangan jika terdapat selisih antara perencanaan dengan aktualnya; dan dijadikan sebagai indikator pelaporan keuangan.¹⁴⁶

QS. Al-Baqarah :2/188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

¹⁴⁵ Suharsih, Pelanggan PAM Tirta Karajae, Bilalang'E Kota Parepare, 19 Juni 2024

¹⁴⁶ Kuswadi, Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2005), hal 25-27.

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”¹⁴⁷

Ayat di atas berisi tentang peringatan untuk menghormati harta orang lain seperti menghormati harta Sewenang-wenang terhadap harta orang lain sama halnya dengan melakukan kejahatan terhadap seluruh umat manusia. Berdasarkan hal ini perlunya sebuah bisnis menjaga etika dan tetap menghargai orang-orang walau orang tersebut seorang konsumen.

1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Di Perusahaan Air Minum Kota Parepare

Transparansi dapat diartikan bahwa perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, menyediakan informasi yang memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Ditegaskan bahwa Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.¹⁴⁸

Berdasarkan pernyataan dari keempat informan pada PAM Tirta Karajae kota Parepare dapat dilihat bahwa pernyataan yang dilontarkan semuanya hampir sama sehingga peneliti merangkum pernyataan dari informan tersebut menjadi satu jawaban. Setiap staf manajemen, pegawai dan pelanggan tidak dapat mengakses

¹⁴⁷ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

¹⁴⁸ Hendrik Manosoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Norlive Kharisma Indonesia, (2016), hal. 23-24

laporan keuangan tapi hanya pihak yang terkait saja didalamnya (pegawai bagian keuangan). Jadi pihak PAM tidak mengekspos secara luas informasi laporan keuangannya tetapi pihak PAM dapat memberikan laporan keuangan jika diminta secara langsung dan apabila sangat dibutuhkan. Akan tetapi setiap tahunnya laporan keuangan tersebut akan di audit dan diperiksa oleh lembaga-lembaga yang sudah diatur oleh pemerintah. Proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional Bagian Keuangan dilakukan dengan cara terbuka dan obyektif dan hanya pihak yang terkait, dengan tetap menjaga kerahasiaan pelanggan. Jadi, pihak PAM sangat menjaga kerahasiaan pelanggan. Dapat dilihat pada contoh yaitu pelanggan PAM menunggak dalam pembayaran tetapi pihak PAM tetap menjaga privasi pelanggan tersebut. Dan PAM telah mempublikasikan Informasi tentang prosedur dan kebijakan di unit kerja secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak di dalam Bagian Keuangan. bidang keuangan juga menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat serta mudah diakses oleh pelanggan PAM dan salah satu informasi yang dapat di akses oleh pelanggan PAM yaitu terkait tagihan pembayaran.”

Pengelolaan Keuangan Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae kota Parepare telah dijalankan dengan prinsip transparansi pada penyusunan laporan keuangan, pengumpulan dan pelaporan terkait keuangan perusahaan. Dapat dikatakan perusahaan PAM mulai menerapkan prinsip transparansi yang termasuk dalam GCG.

Penelitian pada prinsip transparansi di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae kota Parepare sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masri Ermawijaya dimana PAM dalam hal keterbukaan pelaporan informasi dan pengumpulan informasi juga dengan yang dilakukan oleh Masri Ermawijaya pada keterbukaan informasi dan bertanggung jawab terhadap pihak-pihak internal yang

terikat juga masyarakat dan nasabah.¹⁴⁹ Kemudian penelitian transparansi perusahaan air minum tirta karajae tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Putri, dimana PAM dalam hal keterbukaan informasi dan pengumpulan informasi sejalan dengan tepat waktu sedangkan pada penelitian Yulia Putri pada indikator prinsip transparansi yaitu menyediakan informasi secara tepat waktu belum terpenuhi sepenuhnya karena beberapa nasabah terlambat membayar tunggakan yang menyebabkan terlambatnya pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pada indikator prinsip transparansi yaitu informasi mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan hak juga belum terpenuhi.¹⁵⁰

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Perusahaan Air Minum Kota Parepare

Akuntabilitas mengandung makna bahwa perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Maka dari itu perlu untuk mengelola perusahaan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Akuntabilitas juga terkait kejelasan terkait fungsi, sistem, struktur, dan pertanggung jawaban orang-orang perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana dengan efektif. Hal ini diwujudkan dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu dan cara yang tepat.¹⁵¹

Berdasarkan prinsip ini, perlu untuk menetapkan detail tugas serta tanggung jawab dari masing-masing bagian di perusahaan dan semua karyawan secara jelas setara dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.

¹⁴⁹ Masri Ermawijaya, “*Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih*”, Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah (JIAR), Vol. 3, No.2, (2020).

¹⁵⁰ Yulia Putri, Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Badan Milik Desa (BUMDES) Desa Ridan Permai Kabupaten Kampar, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial: Riau, 2022).

¹⁵¹ Hendrik Manosoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Norlive Kharisma Indonesia, (2016), hal. 23-24.

Perusahaan harus menyakini bahwa setiap bagian dalam perusahaan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dalam pelaksanaan GCG.

Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Juga, perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.¹⁵²

Berdasarkan pernyataan dari keempat informan pada PAM Tirta Karajae kota Parepare dapat dilihat bahwa pernyataan yang dilontarkan semuanya hampir sama sehingga peneliti merangkum pernyataan dari informan tersebut menjadi satu jawaban. Dalam penempatan pegawai itu harus sesuai dengan tupoksi dan bidangnya masing-masing tidak menutup kemungkinan hal ini dapat membangun pengetahuan terhadap pegawai PAM Kota Parepare dengan melakukan rotasi, mutasi yang sesuai dengan bidang dan kemampuan ilmunya. selanjutnya salah satu cara bidang keuangan memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan keuangan dengan menggunakan Sistem pengendalian SOP, yang perosedurnya telah pihak PAM jalankan. seperti contoh berikut: jika kantor ingin membeli barang kebutuhan kantor tidak bisa langsung dilakukan pembelian, ada prosedur dan atauran yang harus dilalui agar dapat membeli barang tersebut. Jadi, harus membuat Daftar permintaan barang terlebih dahulu daftar siapa yang membutuhkan, bidang divisi apa yang membutuhkan itu di usulkan, begitu diusulkan baru diproses. selanjutnya pada bagian keuangan PAM memiliki ukuran kinerja untuk semua Pegawai yang konsisten dengan nilai-nilai Bagian Keuangan, sasaran utama, strategi serta memiliki sistem penghargaan dan

¹⁵² Hendrik Manosoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Norlive Kharisma Indonesia, (2016), hal. 23-24.

sanksi Jadi, bukan cuman bagian keuangan saja, ada juga Bagian SDM itu melakukan evaluasi, terhadap capaian-capaian yang telah dicapai makanya setiap bulan harus mereview laporan tersebut dimana letak kekurangannya, apa yang perlu dipertahankan dan bagaimana untuk periode selanjutnya. Sesuai dengan SOP pihak yang ada di PAM kota Parepare sepakat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai pegawai Di PAM Kota Parepare yang berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Untuk sistem penilaian kinerja operasional, organisasi, dan kinerja perseorangan telah ditetapkan, diterapkan dan dievaluasi dengan baik sehingga SPI (satuan pengawas internal) yang Ada di PAM akan mengontrol bagaimana pekerjaan setiap individu baik itu bagian kantor ataupun bagian lapangan dalam hal ini SPI PAM telah melakukan tugasnya sesuai prosedur yang diatur oleh aturan yang berlaku. Jadi semua pekerjaan yang telah terselesaikan itu semuanya dikerjakan mulai dari nol atau dari awal sampai terselesaikan. Selama proses pekerjaan tersebut haruslah di dokumentasikan sehingga ada bukti dalam prosesnya baik itu dalam hal transaksi ataupun hal-hal lainnya.

Pengelolaan keuangan Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae kota Parepare telah Akuntabel terkait fungsi, sistem, struktur, dan pertanggung jawaban orang-orang perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana dengan efektif, dan menyakini bahwa setiap bagian dalam perusahaan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dengan adanya prinsip akuntabilitas ini dapat memberikan kepastian bahwa laporan pengelolaan keuangan PAM Kota Parepare memiliki kualitas yang baik serta dapat dipercaya karena telah berdasarkan prinsip akuntabilitas. Dan dapat dikatakan perusahaan PAM mulai menerapkan prinsip Akuntabilitas yang termasuk dalam GCG.

Penelitian pada prinsip Akuntabilitas di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae kota Parepare sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadya Nurul Sabrina & Isfenti Sadalia, dimana PAM dalam fungsi, sistem, struktur, dan

pertanggung jawaban orang-orang perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana dengan efektif, dan menyakini bahwa setiap bagian dalam perusahaan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya juga dengan yang dilakukan Nadya Nurul Sabrina & Isfenti Sadalia bahwa prinsip Akuntabilitas dalam menetapkan tugas, dan tanggung Jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan telah sejalan.¹⁵³ Juga penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Pramesti dan Daniel Raditya Tandio sejalan, bahwa terkait fungsi, Standar operasional prosedur (SOP), sanksi, masing masing jelas kewajiban dan tanggungjawabnya.¹⁵⁴ Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Yulia Putri tidak sejalan pada prinsip akuntabilitas yaitu menetapkan rincian tanggung jawab organ perusahaan dan masing-masing karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai, dan strategi perusahaan belum terpenuhi karena terjadinya kekurangan sumber daya manusia yang menyebabkan banyaknya posisi organ BUMDes yang kosong dan belum terlaksanakan tanggung jawab dari masing-masing karyawan. Indikator selajutnya yaitu meyakini bahwa semua organ dan karyawan mempunyai kemampuan sesuai 97 tugas dan tanggung jawab juga belum dijalankan sepenuhnya. Kemudian indikator yaitu memiliki ukuran kinerja dan sasaran perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari sistem penghargaan yang tidak terpenuhi karena honor atau financial yang kurang.¹⁵⁵

¹⁵³ Nadya Nurul Sabrina & Isfenti Sadalia, “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan”, Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi (Jebma) Vol. 1, No. 2, (2021).

¹⁵⁴ Gusti Ayu Asri Pramesti & Daniel Raditya Tandio. (*Analisis Implementasi Good Corporate Governance Pada Koperasi Di Kota Denpasar*), Universitas Mahasaraswati Denpasar, Jurnal Riset Akuntansi, Vol.8 No.2, September 2018.

¹⁵⁵ Yulia Putri, Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Badan Milik Desa (BUMDES) Desa Ridan Permai Kabupaten Kampar, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial: Riau, 2022).

3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Di Perusahaan Air Minum Kota Parepare

Prinsip dasar pertanggung Jawaban (*Responsibility*) menjelaskan bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Pertanggung jawaban ialah kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diwujudkan dengan kesadaran akan tanggung jawab dari adanya wewenang, sadar akan tanggung jawab sosial, menjadi profesional dan menjunjung etika dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan memelihara lingkungan bisnis. Pelaksanaan prinsip ini, diharapkan setiap bagian atau anggota dalam perusahaan harus berhati-hati dan memastikan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan.¹⁵⁶

Berdasarkan pernyataan dari keempat informan pada PAM Tirta Karajae kota Parepare, peneliti merangkum pernyataan informan tersebut menjadi satu jawaban. Manajer dan Pegawai Bagian Keuangan telah bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku di Bagian Keuangan. ketika proses dibagian keuangan selesai tentunya pegawai bagian keuangan di PAM melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang ada sehingga dapat diproses. Upaya yang dilakukan bagian keuangan dalam meminimalisir kerugian yang terjadi dengan membuat satu laporan RKA (rencana keperluan anggaran) yang mana diperlukan untuk efisiensi. Sebelum adanya transaksi, estimasi biaya atau anggaran telah ditetapkan. Selanjutnya untuk pendelegasian kewenangan itu seperti contoh berikut: ketika pihak A berhalangan

¹⁵⁶ Hendrik Manosoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Norlive Kharisma Indonesia, (2016), hal. 25.

maka hal itu didelegasikan kebawa, yang dimaksud didelegasikan kebawa itu ada penunjukan surat tugas. Kemudian kepala bidang maupun pegawai melakukan pertanggungjawaban hasil kerja secara continue, secara teratur dilakukan.

Pengelolaan keuangan Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae kota Parepare telah mengikuti Prinsip Pertanggungjawaban terkait kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan dibutuhkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan pembahasan di atas sehingga perusahaan air minum dapat dikatakan mulai menerapkan prinsip pertanggungjawaban yang termasuk dalam GCG

Penelitian pada prinsip Pertanggungjawaban di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae kota Parepare sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Indar Dewi mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan internal serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.¹⁵⁷ Adapun penelitian yang dilakukan oleh Crystha Armereo tidak sejalan, penerapan dari prinsip Responsibility adalah tanggung jawab yang diberikan kepada pengguna layanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, seperti kelengkapan buku yang belum maksimal dan jam pelayanan yang tidak tepat waktu. Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat selaku pengguna layanan perpustakaan. Menurut Hamzah, pengguna layanan perpustakaan mengatakan bahwa: “Saat saya ingin meminjam buku untuk anak saya, perpustakaannya tutup padahal saya kesana saat jam

¹⁵⁷ Putri Indar Dewi, “Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Lembaga Perbankan Syariah”, Jurnal Al-Tsarwah, Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Bone, Vol. 3, No.2, 2020

kerja”. Dari hasil wawancara penulis kepada salah satu pengguna layanan perpustakaan prinsip responsibilitas belum terlaksana dengan baik.¹⁵⁸

4. Kemandirian Pengelolaan Keuangan Di Perusahaan Air Minum Kota Parepare

Prinsip dasar kemandirian adalah keadaan perusahaan yang dikelola dengan profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus dikelola secara independent sehingga setiap bidang dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman pelaksanaan asas ini adalah bahwa masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Kemudian, masing masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.¹⁵⁹

Berdasarkan pernyataan dari keempat informan pada PAM Tirta Karajae kota Parepare, peneliti merangkum pernyataan informan tersebut menjadi satu jawaban. Dalam pengelolaan keuangan PAM Pegawai menghindari terjadinya didominasi oleh pihak manapun Jadi itu tadi saya katakan bahwa di pekerjaan yang satu itu tentunya untuk dibagian pengelolaan keuangan pihak PAM tidak asal menugaskan pegawai tetapi menggunakan prinsip the right man on the right

¹⁵⁸ Crystha Armereo, “Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang”, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol.9 No.2 July 2021

¹⁵⁹ Hendrik Manosoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Norlive Kharisma Indonesia, (2016), hal. 26

place (penempatan seseorang sesuai dengan bidangnya) hal tersebut dilakukan guna memenuhi ini target yang akan pihak PAM capai. Apa gunanya kita menempatkan seseorang ini tetapi bukan tupoksinya, tentunya kalau bukan tupoksinya artinya kita mau capai kedepan ini sesuai dengan itu tadi ada kaitannya dengan GCG itu yakin dan percaya tidak akan tercapai. Selanjutnya cara pegawai agar tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif, Jadi pegawai PAM sudah dibekali oleh ilmu tentang disiplin dalam hal bekerja, dan menanamkan bahwa pegawai tidak boleh memungut apapun di masyarakat itu dalam hal pelayanan. sebagai contoh ketika pelanggan PAM memiliki masalah seperti kebocoran pipa pegawai PAM yang memperbaiki kerusakan pipa tersebut tidak dibayar. Pegawai PAM harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan, dan tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif. pertanyaan selanjutnya terkait keputusan pimpinan, pihak PAM menyatakan tiidak di interpeksi oleh pihak-pihak diluar. Jadi keputusan pimpinan ini berdasarkan dengan SOP yang dari bawah. Proses pengambilan keputusan di bagian keuangan PAM telah dilakukan secara obyektif. Keputusan secara obyektif sesuai dengan data-data yang ada terkumpul kemudian membuatlah satu kesimpulan, satu keputusan bahwa langkah kedepan kita harus lakukan adalah ini.

Pengelolaan keuangan Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae kota Parepare telah mengikuti Prinsip Kemandirian bahwa masing-masing organ perusahaan menghindari terjadinya didominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Dengan kata lain pengelolaan keuangan pihak PAM disusun tanpa campur tangan orang lain hanya pihak yang terkait yang dapat mengolah demi menghindari hal-hal yang telah dijelaskan. Sehingga dalam pengelolaan

keuangan PAM mulai menerapkan prinsip Kemandirian yang termasuk dalam GCG.

Penelitian pada prinsip Kemandirian di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae kota Parepare sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erick Sapta Pratama bahwa perusahaan telah melaksanakan fungsi dan tugasnya dan sesuai dengan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.¹⁶⁰ Adapun penelitian yang dilakukan oleh Crystha Armereo tidak sejalan, penerapan prinsip independensi atau kemandirian di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang dilihat dari setiap dana yang dianggarkan dalam rangka melaksanakan program/kegiatan. Indikator kinerjanya belum terukur secara jelas dan tidak dipresentasikan seperti tolak ukur kinerja serta target/sasaran yang memenuhi aspek keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran serta memberikan manfaat pada masyarakat.¹⁶¹

5. Kewajaran Pengelolaan Keuangan Di Perusahaan Air Minum Tirta Karajae Kota Parepare

Kewajaran dapat juga disebut dengan kesetaraan, dimana ini merujuk pada perlakuan yang adil dan setara. Setara dalam memenuhi hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip ini diwujudkan dengan cara membuat peraturan korporasi yang akan melindungi kepentingan minoritas. Dalam pelaksanaan prinsip ini, Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam

¹⁶⁰ Erick Sapta Pratama, “*Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu*” Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Perbankan Syariah, Bengkulu 2021.

¹⁶¹ Crystha Armereo, “*Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol.9 No.2 July 2021

lingkup 27 kedudukan masing-masing. Juga, perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.¹⁶²

Berdasarkan pernyataan dari keempat informan pada PAM Tirta Karajae kota Parepare peneliti merangkum pernyataan informan tersebut menjadi satu jawaban. Dalam pengelolaan keuangan Manager maupun Pegawai dapat memberikan masukan dan pendapat mereka dalam pembuatan laporan keuangan, jadi pada saat laporan keuangan telah disusun oleh bagian keuangan tentunya pihak PAM melakukan rapat dan dalam rapat tersebutlah pegawai ataupun manager dapat memberikan saran atau masukan dalam perbaikan terhadap perusahaan. selanjutnya PAM telah memberikan perhatian kepada stakeholder dari hal tingkat kepercayaan bahwa program-program yang dilakukan PAM adalah melakukan hal-hal yang dapat membangun tingkat kepercayaan kepada masyarakat. Dalam proses pengelolaan keuangan, Pegawai PAM diberikan kesempatan yang sama dalam melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik, Jadi ini dalam hal kinerja kepada karyawan berkaitan dengan hal tersebut. Pihak PAM senantiasa memperhatikan dan mengajarkan kepada pegawai tentang nilai attituden yang bagus agar tetao terjaga. dalam PAM kota Parepare Perlakuan adil kepada seluruh pihak pemegang kepentingan (pelanggan, pemilik) dalam memberikan pelayanan dan informasi sudah dilakukan dengan semaksimal dan sebaik mungkin kira-kira begitu yah. Jadi pegawai itu kita perlakukan adil dan wajar, adil dan wajar ini kita tidak ada membedakan antara si A dan si B antara golongan, golongan ini kita samakan.

Pengelolaan keuangan Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae kota Parepare telah mengikuti Prinsip Kewajaran bahwa Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan

¹⁶² Hendrik Manosoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Norlive Kharisma Indonesia, (2016), hal. 26-27.

menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan. PAM juga memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Termasuk dengan pengelolaan keuangan di perusahaan air minum yang jujur, disiplin, dan fleksibilitas. Hal tersebut masuk kedalam prinsip kewajaran dapat dikatakan PAM mulai menerapkan Prinsip Kewajaran yang termasuk dalam GCG

Penelitian pada prinsip Kewajaran di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae kota Parepare sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Restu Fauzi, dkk bahwa perusahaan telah memperhatikan kepentingan stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan, selain itu juga perusahaan memberikan kesempatan yang sama untuk memberikan masukan, menyampaikan pendapat, dan informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.¹⁶³ Juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Sunarni Sonu, dkk sejalan, memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional serta penerimaan semua pelanggan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.¹⁶⁴

Adapun pernyataan Ketiga Pelanggan PAM Tirta Karajae kota Parepare yang memperkuat hasil wawancara Penulis: Bahwa dari informasi yang dapat dilihat atau diakses oleh ketiga pelanggan yaitu Informasi terkait pembayaran air di PAM, berita seputar PAM, informasi gangguan pembersihan pompa dan pipa hisap sumur, dan jumlah tagihan pembayaran. Kemudian pelanggan dapat mengakses informasi terkait PAM di aplikasi flif, aplikasi Mobile Banking untuk tagihan pembayaran, dan juga story whatsApp kerabat yang bekerja di PAM. Informasi tersebut sangat cukup membantu dan memudahkan mereka dalam

¹⁶³ Rahmi Restu Fauzi, dkk, “*Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank BPR Garut*”, Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Garut, 2019.

¹⁶⁴ Sri Sunarni Sonu, dkk, “*Analisis Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasaudara Kota Bitung)*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi.

melakukan pembayaran secara online. Terkait cara PAM menyediakan informasi dengan sangat baik contohnya ketika ingin membayar air pastinya mereka dapat intruksi dan notifikasi tentang pembayaran, juga terkait gangguan air, PAM juga menginformasikan kepada pelanggan 1 atau 2 hari sebelum gangguan, dan PAM juga bekerja sama dengan radio mesra dan di radio mesra itu selalu disiarkan terkait informasi seputar PAM. Pelayanan yang diberikan PAM juga cukup baik dan bertanggung jawab ketika ada customer yang airnya bermasalah pasti direspon dengan cepat, dan beretika.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada Bab IV maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi pengelolaan keuangan di perusahaan air minum (PAM) kota Parepare terlaksana dengan baik, dimana transparansi pengelolaan keuangan meliputi dalam keterbukaan, pengumpulan, dan pelaporan informasi terkait keuangan perusahaan
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan di perusahaan air minum (PAM) kota Parepare terlaksana dengan baik, dimana Akuntabilitas pada fungsi, sistem, struktur, dan pertanggung jawaban orang-orang perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana dengan efektif.
3. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di perusahaan air minum (PAM) kota Parepare terlaksana dengan baik, dimana dapat dilihat dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kemandirian pengelolaan keuangan di perusahaan air minum (PAM) kota Parepare terlaksana dengan baik, dimana dapat dilihat bahwa masing-masing organ perusahaan menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
5. Kewajaran pengelolaan keuangan di perusahaan air minum (PAM) kota Parepare terlaksana dengan baik, dimana dapat dilihat bahwa perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan juga memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada

pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat memberi manfaat, lembaga penelitian dan peneliti selanjutnya. Adapun saran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tetap menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan mengimplementasikan pelaksanaannya kepada seluruh tingkatan yang ada di Perusahaan Air Minum (PAM) kota Parepare secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam setiap aktifitas usaha operasional. Karena *good corporate governance* sebuah sistem tata kelola organisasi berisi peraturan dimana mengatur terkait hubungan antara kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban.
2. Peneliti selanjutnya agar mencoba mengambil cakupan wilayah yang lebih luas sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait implementasi GCG dalam Perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahnya

- Armereo, C. Analisis *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Keuangan Di Kantor Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Palembang. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 9, No. 2. 2021.
- Ermawijaya, Masri. "Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*. Vol.3 No.2. 2020.
- Fadhillah, Rizky. "Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Dan Resiko Pembiayaan Di Bank Umum Syariah". *Industrial research workshop and national seminar*.
- Fadli. "*Memahami Desain Metode Penelitian KUalitatif*" *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* Vol. 2. No. 1.
- Furqani, Astri. "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Sumenep". *Jurnal Performance Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 4 No.1 (2014).
- Gunawan, Imam. "*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*". Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Hidayat, Kevan dkk. "Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Bisnis di Masa Pandemi pada Pelaku Bisnis Generasi Milenial di Wilayah Bandung". *Jurnal akuntansi*. Vol. 14. No. 01, 2022.
- Kaihatu, Thomas S. "*Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 8 No. 1, 2015.
- Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Edisi Pertama Jakarta: Kencana, 2010.
- Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (diakses pada tanggal 5 Maret 2024).
- Kuswadi, Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2005.
- Maharani, Nadia Putri. 2023. "Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi: Palembang.

- Manosoh, Hendrik. *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Norlive Kharisma Indonesia. 2016.
- Merida. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Perbankan*. Jurnal Penelitian, Pengembangan Ilmu Manajemen dan Akuntansi, Vol. 15. No. 1. 2017.
- Muryanto, Yudho Taruno., *Tata Kelola BUMD: Konsep, Kebijakan, dan Penerapan Good Corporate Governance*, Malang: Intrans Publishing, 2017.
- Pasal 2 Undang-Undang No.5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/50675/uu-no-5-tahun-1962> (diakses pada tanggal 5 Maret 2024).
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of corporate Governance): Revisi 0.5 Jakarta: PT. Nindya Karya, 2020.
- Putri, Yulia. 2022. “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Badan Milik Desa (BUMDES) Desa Ridan Permai Kabupaten Kampar”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial: Riau.
- Radifan, Rusdan. 2015. “Analisis Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kemungkinan Financial Distress”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomika dan Bisnis: Semarang.
- Redaksi. 2021. *PDAM Berubah Status Jadi Perumda, Firdaus Apresiasi Walikota Parepare*. Media Suara Sulsel, <https://voicesulsel.com/pdam-berubah-status-jadi-perumda-firdaus-apresiasi-wali-kota-parepare/> (diakses pada tanggal 5 Maret 2024).
- Romli, Asep Syamsul M. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- Sadalia, Isfenti dan Nadya Nurul S. “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan”. Jurnal Ekonomi Bisnis. Manajemen dan Akuntansi (Jebma). Vol. 1 NO. 2. 2021.
- Satori, Djam’an dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sembiring, Sentosa. “*Hukum Perusahaan dalam Peraaturan Perundang-Undangan*”, Bandung: Nuansa Aylia, 2006.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&H*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sulistiowati dan Asrofi Langgeng N. “Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal”. Jurnaal Monex. Vol. 6. No. 1. 2017.

- Sundjaja, Ridwan S. dan Inge Barlian. 2003. *Manajemen Keuangan*, Edisi Keempat Jakarta: Literata Lintas Media.
- Sutedi, Adrian. “*Good Corporate Governance. Edisi 1. Cetakan 2*”. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Syofyan, Efrizal. “*Good Corporate Governance (GCG)*”. Malang: Unisma Press. 2021.
- Titian. Staf Bagian Keuangan. Wawancara di Kantor PAM Tirta Karajae Kota Parepare. 27 Februari 2024.
- Wibowo, Edi. “Implementasi *Good Corporate Governance* di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*. Vol. 10 No. 2. 2015.
- Sari, Nurmala. 2017. “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan”. Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Medan.
- Yuesti, Anik dan Putu Kepramareni. 2019. “*Manajemen Keuangan Jendela Pengelolaan Bisnis*”. Bali: CV. Noah Aletheia.
- Nadya Nurul Sabrina & Isfenti Sadalia, “*Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan*”, *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi (Jebma)* Vol. 1, No. 2, (2021).
- Putri Indar Dewi, “*Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Lembaga Perbankan Syariah*”, *Jurnal Al-Tsarwah, Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Bone*, Vol. 3, No.2, 2020
- Erick Sapta Pratama, “*Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu*” Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Perbankan Syariah, Bengkulu 2021.
- Rahmi Restu Fauzi, dkk, “*Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank BPR Garut*”, Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Garut, 2019.
- Gusti Ayu Asri Pramesti & Daniel Raditya Tandio. (*Analisis Implementasi Good Corporate Governance Pada Koperasi Di Kota Denpasar*), Universitas Mahasaraswati Denpasar, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.8 No.2, September 2018.
- Crystha Armereo, “*Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 2, July 2021.

Sri Sunarni Sonu, dkk, “*Analisis Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasaudara Kota Bitung)*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi.







Nama Mahasiswa : Rezki Baharani
 Nim/Prodi : 2020203861211057/Manajemen Keuangan Syariah
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
 Judul : Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan Di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk PAM Tirta Karajae Kota Parepare: PLH Direktur & PLT. Manager Keuangan PAM Tirta Karajae

A. Prinsip Transparansi

1. Apakah setiap manajemen, Pegawai, dan pelanggan dapat mengakses laporan keuangan perusahaan?
2. Bagaimana proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional Bagian Keuangan dilakukan? Apakah secara terbuka dan obyektif, dengan tetap menjaga kerahasiaan pelanggan?
3. Informasi tentang prosedur dan kebijakan di unit kerja telah dipublikasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak di dalam Bagian Keuangan?

4. Apakah bidang keuangan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat serta mudah diakses oleh pelanggan PAM?
5. Informasi apa saja yang dapat diakses secara bebas oleh pelanggan?

B. Prinsip Akuntabilitas

2. Apakah Bagian Keuangan meyakini bahwa semua bagian perusahaan dan semua Pegawai mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG?
3. Bagaimana bidang keuangan memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan keuangan?
4. Apakah bagian keuangan memiliki ukuran kinerja untuk semua Pegawai yang konsisten dengan nilai-nilai Bagian Keuangan, sasaran utama, strategi serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi?
5. Apakah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya setiap Pegawai harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati?
6. Apakah sistem penilaian kinerja operasional, organisasi, dan kinerja perseorangan telah sepakat ditetapkan, diterapkan dan dievaluasi dengan baik?
7. Apakah hasil pekerjaan telah didokumentasikan, dipelihara, dan dijaga dengan baik?

C. Prinsip Pertanggungjawaban

1. Apakah Manajer dan Pegawai Bagian Keuangan telah bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku di Bagian Keuangan?
2. Bagaimana upaya Bagian Keuangan menghindari kerugian yang terjadi?
3. Apakah proses pendelegasian kewenangan telah dijalankan dengan cukup dan baik demi terselenggaranya pekerjaan?

4. Apakah kepala bidang dan Pegawai melakukan pertanggungjawaban hasil kerja secara teratur?

D. Prinsip Kemandirian (Independency)

1. Saat mengolah keuangan, staf menghindari terjadinya didominasi oleh pihak manapun?
2. Bagaimana cara staf agar tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif?
3. Apakah Pegawai harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan, dan tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif?
4. Apakah Keputusan pimpinan hendaknya lepas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan Bagian Keuangan?
5. Apakah proses pengambilan keputusan di Bagian Keuangan telah dilakukan secara obyektif untuk kepentingan Bagian Keuangan?

E. Prinsip Kewajaran (Fairness)

1. Dalam pengelolaan keuangan apakah Manager maupun Pegawai dapat memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan mereka pada pembuatan laporan keuangan?
2. Apakah Manager (kepala bidang) memberikan perlakuan yang setara dan wajar sesuai dengan kontribusi yang dilakukan oleh Pegawai?
3. Bagaimana Manager (kepala bidang) memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder secara wajar menurut ketentuan yang berlaku umum?
4. Dalam proses pengelolaan keuangan, Pegawai diberikan kesempatan yang sama dalam melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik?

5. Apakah Perlakuan adil kepada seluruh pihak pemegang kepentingan (pelanggan, pemilik) dalam memberikan pelayanan dan informasi sudah dilakukan?
6. Apakah perlakuan, pengembangan timwork, hubungan kerja dan pembinaan pada Pegawai bagian keuangan akan dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajibannya secara adil dan wajar?

Assisten Manager Asset (Bagian Keuangan) PAM Tirta Karajae

A. Prinsip Keterbukaan (Tranparancy)

1. Apakah setiap manajemen, Pegawai, dan pelanggan dapat mengakses laporan keuangan perusahaan?
2. Bagaimana proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional Bagian Keuangan dilakukan? Apakah secara terbuka dan obyektif, dengan tetap menjaga kerahasiaan pelanggan?
3. Informasi tentang prosedur dan kebijakan di unit kerja telah dipublikasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak di dalam Bagian Keuangan?
4. Apakah bidang keuangan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat serta mudah diakses oleh pelanggan PAM?
5. Informasi apa saja yang dapat diakses secara bebas oleh pelanggan?

B. Prinsip Akuntabilitas

1. Apakah Bagian Keuangan meyakini bahwa semua bagian perusahaan dan semua Pegawai mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG?
2. Bagaimana bidang keuangan memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan keuangan?

3. Apakah bagian keuangan memiliki ukuran kinerja untuk semua pegawai yang konsisten dengan nilai-nilai bagian keuangan, sasaran utama, strategi serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi?
4. Apakah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya setiap Pegawai harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati?
5. Apakah sistem penilaian kinerja operasional, organisasi, dan kinerja perseorangan telah sepakat ditetapkan, diterapkan dan dievaluasi dengan baik?
6. Apakah hasil pekerjaan telah didokumentasikan, dipelihara, dan dijaga dengan baik?

C. Prinsip Pertanggungjawaban

1. Apakah manajer dan Pegawai Bagian Keuangan telah bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku di Bagian Keuangan?
2. Bagaimana upaya bagian keuangan menghindari kerugian yang terjadi?
3. Apakah proses pendelegasian kewenangan telah dijalankan dengan cukup dan baik demi terselenggaranya pekerjaan?
4. Apakah kepala bidang dan Pegawai melakukan pertanggungjawaban hasil kerja secara teratur?

D. Prinsip Kemandirian (Independency)

1. Saat mengelolah keuangan, Pegawai menghindari terjadinya didominasi oleh pihak manapun?
2. Bagaimana cara Pegawai agar tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif?

3. Apakah Pegawai harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan, dan tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif?
4. Apakah keputusan peminan hendaknya lepas dari dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan bagian keuangan?

E. Prinsip Kewajaran (Fairness)

1. Dalam pengelolaan keuangan apakah Manager maupun Pegawai dapat memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan mereka pada pembuatan laporan keuangan?
2. Apakah Direktur memberikan perlakuan yang setara dan wajar sesuai dengan kontribusi yang dilakukan oleh Pegawai?
3. Dalam proses pengelolaan keuangan, Pegawai diberikan kesempatan yang sama dalam melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik?
4. Apakah Perlakuan adil kepada seluruh pihak pemegang kepentingan (pelanggan, pemilik) dalam memberikan pelayanan dan informasi sudah dilakukan?

Karyawan BUMD (Assisten Manager Pembukuan dan akuntansi Bagian Keuangan) PAM Tirta Karajae

A. Prinsip Transparansi

1. Apakah setiap manajemen, Pegawai, dan pelanggan dapat mengakses laporan keuangan perusahaan?
2. Bagaimana proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional Bagian Keuangan dilakukan? Apakah secara terbuka dan obyektif, dengan tetap menjaga kerahasiaan pelanggan?

3. Informasi tentang prosedur dan kebijakan di unit kerja telah dipublikasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak di dalam Bagian Keuangan?
4. Apakah bidang keuangan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat serta mudah diakses oleh pelanggan PAM?
5. Informasi apa saja yang dapat diakses secara bebas oleh pelanggan?

B. Prinsip Akuntabilitas

1. Apakah Bagian Keuangan meyakini bahwa semua bagian perusahaan dan semua Pegawai mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG?
2. Apakah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya setiap Pegawai harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati?
3. Apakah sistem penilaian kinerja operasional, organisasi, dan kinerja perseorangan telah sepakat ditetapkan, diterapkan dan dievaluasi dengan baik?
4. Apakah hasil pekerjaan telah didokumentasikan, dipelihara, dan dijaga dengan baik?

C. Prinsip Pertanggungjawaban

1. Apakah manajer dan Pegawai Bagian Keuangan telah bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku di Bagian Keuangan?
2. Apakah proses pendelegasian kewenangan telah dijalankan dengan cukup dan baik demi terselenggaranya pekerjaan?
3. Apakah kepala bidang dan Pegawai melakukan pertanggungjawaban hasil kerja secara teratur?

D. Prinsip Kemandirian (Independency)

1. Bagaimana cara Pegawai agar tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif?
2. Apakah Pegawai harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan, dan tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif?
3. Apakah proses pengambilan keputusan di Bagian Keuangan telah dilakukan secara obyektif untuk kepentingan Bagian Keuangan?

E. Prinsip Kewajaran (Fairness)

1. Dalam pengelolaan keuangan apakah Direktur maupun Pegawai dapat memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan mereka pada pembuatan laporan keuangan?
2. Apakah Direktur memberikan perlakuan yang setara dan wajar sesuai dengan kontribusi yang dilakukan oleh Pegawai?
3. Dalam proses pengelolaan keuangan, Pegawai diberikan kesempatan yang sama dalam melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik?
4. Apakah Perlakuan adil kepada seluruh pihak pemegang kepentingan (pelanggan, pemilik) dalam memberikan pelayanan dan informasi sudah dilakukan?

Karyawan PAM Tirta Karajae (Bagian Keuangan)

A. Prinsip Transparansi

1. Apakah setiap manajemen, Pegawai, dan pelanggan dapat mengakses laporan keuangan perusahaan?

2. Informasi tentang prosedur dan kebijakan di unit kerja telah dipublikasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak di dalam Bagian Keuangan?
3. Apakah bidang keuangan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat serta mudah diakses oleh pelanggan PAM?
4. Informasi apa saja yang dapat diakses secara bebas oleh pelanggan?

B. Prinsip Akuntabilitas

1. Apakah Bagian Keuangan meyakini bahwa semua bagian perusahaan dan semua Pegawai mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG?
2. Apakah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya setiap Pegawai harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati?
3. Apakah sistem penilaian kinerja operasional, organisasi, dan kinerja perseorangan telah sepakat ditetapkan, diterapkan dan dievaluasi dengan baik?
4. Apakah hasil pekerjaan telah didokumentasikan, dipelihara, dan dijaga dengan baik?

C. Prinsip Pertanggungjawaban

1. Apakah manajer dan Pegawai Bagian Keuangan telah bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku di Bagian Keuangan?
2. Bagaimana upaya Bagian Keuangan menghindari kerugian yang terjadi?
3. Apakah proses pendelegasian kewenangan telah dijalankan dengan cukup dan baik demi terselenggaranya pekerjaan?
4. Apakah kepala bidang dan Pegawai melakukan pertanggungjawaban hasil kerja secara teratur?

D. Prinsip Kemandirian (Independency)

1. Saat mengelolah keuangan, Pegawai menghindari terjadinya didominasi oleh pihak manapun?
2. Bagaimana cara Pegawai agar tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif?
3. Apakah proses pengambilan keputusan di Bagian Keuangan telah dilakukan secara obyektif untuk kepentingan Bagian Keuangan?

E. Prinsip Kewajaran (Fairness)

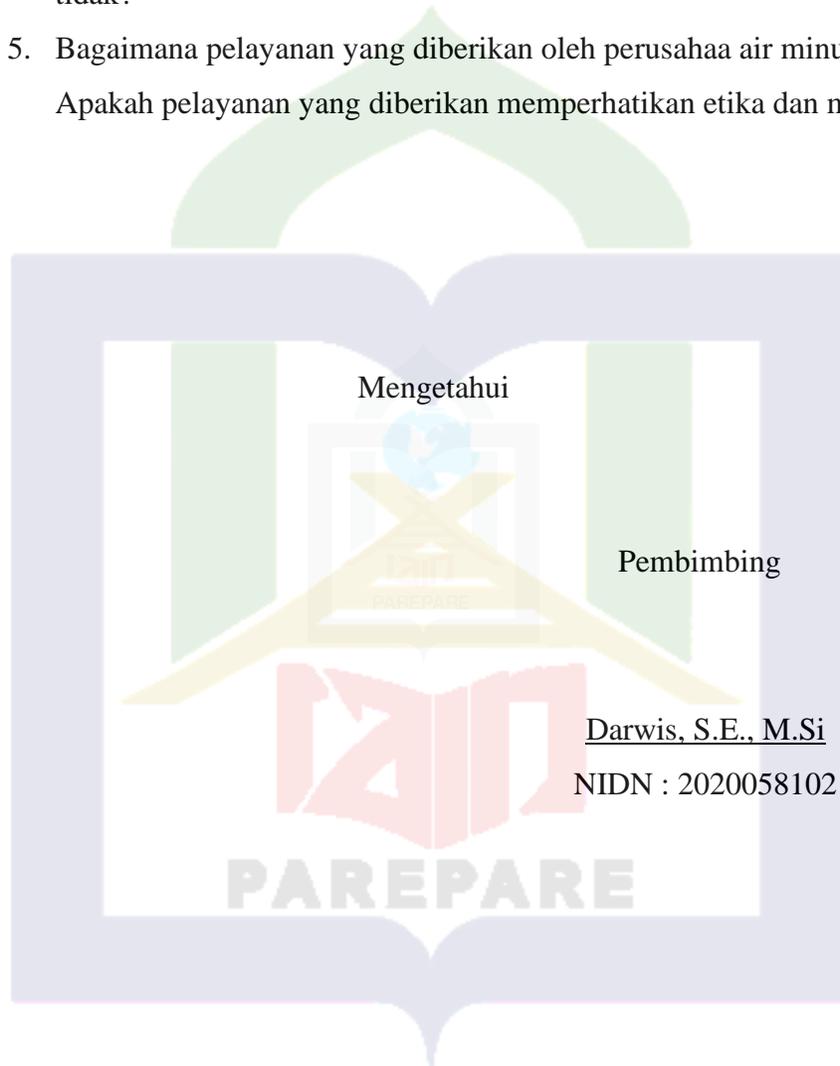
1. Dalam pengelolaan keuangan apakah Manager maupun Pegawai dapat memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan mereka pada pembuatan laporan keuangan?
2. Apakah Direktur memberikan perlakuan yang setara dan wajar sesuai dengan kontribusi yang dilakukan oleh pegawai?
3. Dalam proses pengelolaan keuangan, pegawai diberikan kesempatan yang sama dalam melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik?
4. Apakah Perlakuan adil kepada seluruh pihak pemegang kepentingan (pelanggan, pemilik) dalam memberikan pelayanan dan informasi sudah dilakukan?

Pelanggan PAM Tirta Karajae Kota Parepare:

1. Habibah (Jln. Laupe, lorong poltekes Km.5)
2. Hernan (Jln. Kesuma Timur)
3. Suharsih S.Pd. (Bilalang'E, Bacukiki)

Pertanyaan Wawancara Ketiga Pelanggan PAM:

1. Informasi apa saja yang dapat dilihat/diakses oleh bapak/ibu?
2. Dimana bapak/ibu dapat diakses informasi terkait PAM?
3. Apakah informasi tersebut sudah cukup?
4. Bagaimana cara PAM menyediakan informasi? Apakah tepat waktu atau tidak?
5. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh perusahaan air minum?
Apakah pelayanan yang diberikan memperhatikan etika dan moral?



1. Laporan Keuangan PAM Tahun 2022

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE
KOTA PAREPARE
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

	2022 Rp	2021 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.514.023.262	(3.468.801.929)
Penyesuaian:		
Beban Penyesihan Piutang	1.328.122.900	330.039.573
Beban Penyusutan Aktiva Tetap	9.449.698.036	8.962.415.615
Beban Imbalan Kerja	(157.791.001)	348.690.000
Kas sebelum perubahan modal kerja	12.134.053.197	6.172.343.259
Perubahan Modal Kerja		
Penurunan (kenaikan) Deposito	-	(2.150.000.000)
Penurunan (kenaikan) Piutang Usaha	(1.480.751.172)	285.380.756,00
Penurunan (kenaikan) Piutang Lain-lain	117.989.863	(108.000.671)
Penurunan (kenaikan) Persediaan	(472.309.461)	(665.013.544)
Penurunan (kenaikan) Uang Muka Pembelian	89.456.786	(157.052.500)
Kenaikan (Penurunan) Utang Usaha	84.649.544	-
Kenaikan (Penurunan) Utang Non Usaha	-	4.399.216
Kenaikan (Penurunan) Biaya Yang Masih Harus Dibayar	41.191.199	-
Kenaikan (Penurunan) Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak	380.482.449	(319.712.938)
Kenaikan (Penurunan) Utang Jangka Pendek Lainnya	(2.158.435)	52.511
Jumlah Perubahan Modal Kerja	(1.241.449.227)	(3.109.947.170)
KAS BERSIH TERSEDIA DARI AKTIVITAS OPERASI	10.892.603.970	3.062.396.089
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Tetap	(5.826.446.561)	(9.606.514.002)
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Lain-lain	-	-
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	(5.826.446.561)	(9.606.514.002)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kenaikan (Penurunan) Modal Disetor	-	5.277.839.194
KAS BERSIH TERSEDIA DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-	5.277.839.194
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	5.066.157.409	(1.266.278.719)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	10.532.477.350	11.798.756.067
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	15.598.634.759	10.532.477.350

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE
KOTA PAREPARE
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

	2022 Rp	2021 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Labas (Rugi) Tahun Berjalan	1.514.023.262	(3.468.801.929)
Penyesuaian:		
Beban Penyisihan Piutang	1.328.122.900	330.039.573
Beban Penyusutan Aktiva Tetap	9.449.698.036	8.962.415.615
Beban Imbalan Kerja	(157.791.001)	348.690.000
Kas sebelum perubahan modal kerja	12.134.053.197	6.172.343.259
Perubahan Modal Kerja		
Penurunan (kenaikan) Deposito	-	(2.150.000.000)
Penurunan (kenaikan) Piutang Usaha	(1.480.751.172)	285.380.756,00
Penurunan (kenaikan) Piutang Lain-lain	117.989.863	(108.000.671)
Penurunan (kenaikan) Persediaan	(472.309.461)	(665.013.544)
Penurunan (kenaikan) Uang Muka Pembelian	89.456.786	(157.052.500)
Kenaikan (Penurunan) Utang Usaha	84.649.544	-
Kenaikan (Penurunan) Utang Non Usaha	-	4.399.216
Kenaikan (Penurunan) Biaya Yang Masih Harus Dibayar	41.191.199	-
Kenaikan (Penurunan) Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak	380.482.449	(319.712.938)
Kenaikan (Penurunan) Utang Jangka Pendek Lainnya	(2.158.435)	52.511
Jumlah Perubahan Modal Kerja	(1.241.449.227)	(3.109.947.170)
KAS BERSIH TERSEDIA DARI AKTIVITAS OPERASI	10.892.603.970	3.062.396.089
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Tetap	(5.826.446.561)	(9.606.514.002)
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Lain-lain	-	-
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	(5.826.446.561)	(9.606.514.002)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kenaikan (Penurunan) Modal Ditetapkan	-	5.277.839.194
KAS BERSIH TERSEDIA DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-	5.277.839.194
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	5.066.157.409	(1.266.278.719)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	10.532.477.350	11.798.756.067
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	15.598.634.759	10.532.477.350

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE
KOTA PAREPARE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

	MODAL PEMERINTAH KOTA	MODAL PEMERINTAH YANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA	SALDO LABA (RUGI)	JUMLAH EKUITAS
Saldo Per 31 Desember 2020	31.002.013.039	39.468.543.989	(15.616.385.812)	54.854.171.216
Tambahan Modal Pemerintah Kota	-	52.778.839.194	-	52.778.839.194
Laba (Rugi) Tahun 2021	-	-	(3.468.801.929)	(3.468.801.929)
Saldo Per 31 Desember 2021	31.002.013.039	44.746.383.183	(19.085.187.741)	56.663.208.481
Laba (Rugi) Tahun 2022	-	-	1.514.023.262	1.514.023.262
Saldo Per 31 Desember 2022	31.002.013.039	44.746.383.183	(17.571.164.479)	58.177.231.743

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE
KOTA PAREPARE
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

	2022 Rp	2021 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Labas (Rugi) Tahun Berjalan	1.514.023.262	(3.468.801.929)
Penyesuaian:		
Beban Penyisihan Piutang	1.328.122.900	330.039.573
Beban Penyusutan Aktiva Tetap	9.449.698.036	8.962.415.615
Beban Imbalan Kerja	(157.791.001)	348.690.000
Kas sebelum perubahan modal kerja	12.134.053.197	6.172.343.259
Perubahan Modal Kerja		
Penurunan (kenaikan) Deposito	-	(2.150.000.000)
Penurunan (kenaikan) Piutang Usaha	(1.480.751.172)	285.380.756,00
Penurunan (kenaikan) Piutang Lain-lain	117.989.863	(108.000.671)
Penurunan (kenaikan) Persediaan	(472.309.461)	(665.013.544)
Penurunan (kenaikan) Uang Muka Pembelian	89.456.786	(157.052.500)
Kenaikan (Penurunan) Utang Usaha	84.649.544	-
Kenaikan (Penurunan) Utang Non Usaha	-	4.399.216
Kenaikan (Penurunan) Biaya Yang Masih Harus Dibayar	41.191.199	-
Kenaikan (Penurunan) Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak	380.482.449	(319.712.938)
Kenaikan (Penurunan) Utang Jangka Pendek Lainnya	(2.158.435)	52.511
Jumlah Perubahan Modal Kerja	(1.241.449.227)	(3.109.947.170)
KAS BERSIH TERSEDIA DARI AKTIVITAS OPERASI	10.892.603.970	3.062.396.089
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Tetap	(5.826.446.561)	(9.606.514.002)
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Lain-lain	-	-
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	(5.826.446.561)	(9.606.514.002)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kenaikan (Penurunan) Modal Disetor	-	5.277.839.194
KAS BERSIH TERSEDIA DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-	5.277.839.194
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	5.066.157.409	(1.266.278.719)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	10.532.477.350	11.798.756.067
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	15.598.634.759	10.532.477.350

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG

PENYERTAAN MODAL SECARA NON KAS PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAREPARE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Secara Non Kas Pemerintah Daerah Kota Parepare kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber APBD.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas.
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 1976 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
21. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 101).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE
Dan
WALIKOTA PAREPARE

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PENYERTAAN MODAL SECARA NON KAS PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAREPARE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Parepare;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;

7. Penyertaan

7. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah;
8. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang dan kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah;
9. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pemerintah daerah pada PDAM;
10. Non Kas adalah Transaksi yang tidak melibatkan adanya uang kas, berupa perhitungan yang menyangkut penambahan maupun pengurangan, baik aset maupun perubahan posisi dalam pos-pos tertentu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk penyelesaian utang PDAM kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Hibah Non Kas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada PDAM Kota Parepare sebesar Rp. 4.477.099.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Hibah Non Kas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah.

BAB IV PENCATATAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PDAM mencatat sebagi penyertaan modal dari Pemerintah Daerah pada Neraca PDAM;
- (2) Pencatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus dicatat sebagi penyelesaian Hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Walikota dan DPRD melakukan Pengawasan terhadap penyertaan Modal Daerah yang diberikan kepada PDAM;
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menunjuk Badan Pengawas untuk melaksanakan pengawasan;
- (3) Setiap akhir Tahun Anggaran PDAM berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen kepada Walikota Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Badan Pengawas.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 23 Desember 2016

WALIKOTA PAREPARE,

Ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE

Ttd

MUSTAFA MAPPANGARA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR:B.HK.HAM.13.200.16

PAREPARE

DOKUMENTASI WAWANCARA

2. Observasi Di PAM Tirta Karajae Kota Parepare



3. Wawancara dengan PLH Direktur & PLT Manager Keuangan PAM Kota Parepare



4. Wawancara dengan Assisten Manager Asset PAM Kota Parepare



5. Wawancara dengan Assisten Pembukuan dan Akuntansi PAM Kota Parepare



6. Wawancara dengan Karyawan Bagian Keuangan PAM Kota Parepare



7. Wawancara dengan Pelanggan PAM Kota Parepare



8. Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.6250/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2023 30 November 2023
 Lampiran : -
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Darwis, S.E., M.Si.**

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Rezki Baharani
 NIM. : 2020203861211057
 Prodi. : Manajemen Keuangan Syariah

Tanggal **25 Oktober 2023** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DI PERUSAHAAN AIR MINUM (PAM) TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP. 197102082001122002

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip

9. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1586/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2024

17 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : REZKI BAHARANI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 24 April 2000
NIM : 2020203861211057
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Keuangan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. ANEKA BUNTA, KELURAHAN UJUNG LARE, KECAMATAN SOREANG,
KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WILAYAH KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PRINSIP MANAJEMEN KEUANGAN DI PERUSAHAAN AIR MINUM (PAM) TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan dengan mengucapkan terimakasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

10. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal

		SRN IP000347
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 347/IP/DPM-PTSP/5/2024		
<p>Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :</p>		
M E N G I Z I N K A N		
KEPADA NAMA	: REZKI BAHARANI	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREAPRE	
Jurusan	: MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH	
ALAMAT	: JL. ANDI SINTA NO. 35 B PAREPARE	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DI PERUSAHAAN AIR MINUM (PAM) TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE	
LOKASI PENELITIAN	: PAM TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE	
LAMA PENELITIAN	: 20 Mei 2024 s.d 20 Juni 2024	
a.	Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
b.	Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 22 Mei 2024	
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE	
	 Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 19741013 200604 2 019	
Biaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



11. Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Perusahaan Air Minum Kota Parepare



**PERUMDA AIR MINUM TIRTA KARAJAE
KOTA PAREPARE**

Nomor : 103/PAM-TK/ VI /2024
Lamp. : -
Perihal : **Persetujuan Penelitian**

Parepare, 4 Juni 2024

Kepada Yth.
**REZKI BAHARANI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
di - **PAREPARE**

Menunjuk surat Saudara Nomor : 347 / IP / DPM-PTSP / 5 / 2024, tanggal 22 Mei 2024 Perihal : Surat Rekomendasi Penelitian, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa pada dasarnya kami tidak keberatan dan bersedia menerima sebanyak 1 (satu) orang mahasiswa (i) sebagai berikut :

NO	NAMA	JURUSAN	JUDUL PENELITIAN
1	REZKI BAHARANI	MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH	Analisis Good Corporate Governance pada Pengelolaan Keuangan di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare

Selanjutnya diminta agar peserta dapat memenuhi dan melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku di PAM Tirta Karajae Kota Parepare.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi.

Plh. DIREKTUR,

PAM TIRTA KARAJAE
KOTA PAREPARE
RAHMAN, S.E.
NPP. 940 668 059

MANDIRI LINGGUL DAN TERPERCAYA

 0813-205-409400
 info@pamtk.kota-parepare.go.id
 0411-2900000
 www.pamtk.kota-parepare.go.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahman, SE .
Umur : 55 tahun .
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PLH Direktur PAM Tirta Karajae Kota Parepare.

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rezki Baharani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan Di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare" Demikian surat wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 JUNI 2024

Narasumber


Rahman, SE .

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marwah Pwe , SE.

Umur : 32 Tahun .

Jenis Kelamin : Perempuan .

Pekerjaan : Ass . manager Ass . (PAM Tirta Karajae)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rezki Baharani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan Di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare" Demikian surat wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 JUNI 2024

Narasumber


.....
Marwah Pwe.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIWIEK HASTYA, SM.

Umur : 41 TAHUN

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Pekerjaan : KARYAWAN BUMI (PAM TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rezki Baharani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan Di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare" Demikian surat wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 JUNI 2024

Narasumber


.....WIWIEK HASTYA.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUM. AEFIN
Umur : 31 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Kory. PAM Tirta Karajae

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rezki Baharani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan Di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare" Demikian surat wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 JUNI 2024

Narasumber



MUM. AEFIN.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Habibah

Umur : 58 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rezki Baharani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan Di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare" Demikian surat wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juni 2024

Narasumber


Habibah

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *HERNAN*

Umur : *23 Tahun*

Jenis Kelamin : *LAKI-LAKI*

Pekerjaan : *MAHASISWA*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rezki Baharani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan Di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare" Demikian surat wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 JUNI 2024

Narasumber

Hernan
HERNAN

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARSUH, S.Pd

Umur : 24

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : PPS

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rezki Baharani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan Di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare" Demikian surat wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juni 2024

Narasumber


.....
Suharsuh

PAREPARE

BIODATA PENULIS



Rezki Baharani adalah penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 24 April 2000, di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Baharuddin dan Ibu Heriyani. Penulis pertama kali masuk pendidikan di TK Umdi Ujung Baru Parepare, Kemudian melanjutkan pendidikan di UPTD SDN 47 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Parepare. Penulis melanjutkan pendidikan ke SMKN 2 Parepare dan pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hingga pada tahun 2024 penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir dengan Judul Skripsi “**Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan Di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare**”

